



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**ANALISIS PERBANDINGAN BIAYA PENGADAAN BERAS OLEH
PERUM BULOG DIVISI REGIONAL SUMATERA BARAT DARI
WILAYAH JAWA TIMUR DENGAN WILAYAH SUMATERA BARAT
(DENGAN INSTRUMEN HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH DAN
HARGA RIIL YANG BERLAKU)**

SKRIPSI



**RANI DESTI SEPTIANI
07114068**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

**ANALISIS PERBANDINGAN BIAYA PENGADAAN BERAS
OLEH PERUM BULOG DIVISI REGIONAL SUMATERA
BARAT DARI WILAYAH JAWA TIMUR DENGAN WILAYAH
SUMATERA BARAT
(Dengan Instrumen Harga Pembelian Pemerintah Dan Harga Riil Yang
Berlaku)**

OLEH

RANI DESTI SEPTIANI
07114068

SKRIPSI

**SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA PERTANIAN**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

**ANALISIS PERBANDINGAN BIAYA PENGADAAN BERAS
OLEH PERUM BULOG DIVISI REGIONAL SUMATERA
BARAT DARI WILAYAH JAWA TIMUR DENGAN WILAYAH
SUMATERA BARAT
(Dengan Instrumen Harga Pembelian Pemerintah Dan Harga Riil Yang
Berlaku)**

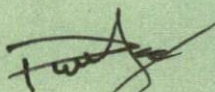
OLEH

RANI DESTI SEPTIANI

07114068

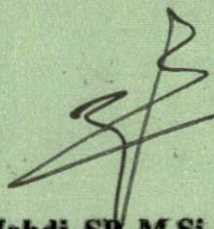
MENYETUJUI:

Dosen Pembimbing I



Drs. Rusdja Rustam, M.Ag
NIP. 19580502 198803 2 001

Dosen Pembimbing II



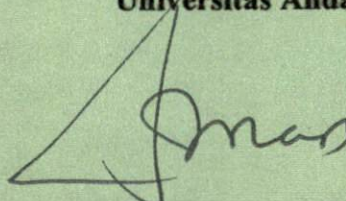
Mahdi, SP, M.Si, Ph.D
NIP. 19710410 200003 1 002

**Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Andalas**



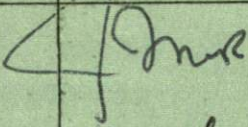

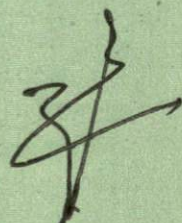
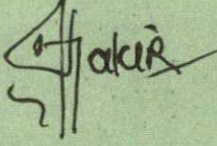
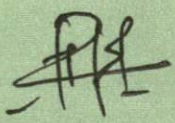
Prof. Ir. H. Ardi, M.Sc
NIP. 19531216 198003 1 004

**Ketua Jurusan Sosial Ekonomi
Fakultas Pertanian
Universitas Andalas**



Prof. Ir. Yonariza, M.Sc, Ph.D
NIP. 19650505 199103 1 003

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang, pada tanggal 21 Desember 2011

No.	Nama	Tanda tangan	Jabatan
1.	Prof. Ir. Yonariza, M.Sc, Ph.D		Ketua
2.	Drs. Rusdja Rustam, M.Ag		Sekretaris
3.	Mahdi, SP, M.Si, Ph.D		Anggota
4.	Ir. Zelfi Zakir, M.Si		Anggota
5.	Rina Sari, SP, M.Si		Anggota



"Sesungguhnya urusan-Nya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata 'Jadilah!' maka jadilah ia" -
Yasin, 82-

"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." -Al Mujadilah, 11-

Puji syukur selalu dipanjatkan kepada The Greatest and The Power of All Allah SWT, atas segala jalan yang diberikan, meski tak selalu mulus pasti yang terbaik untuk saya. Because I always believe everything happen for some reasons.

Teruntuk keluarga yang selalu mencintai dan dicintai. Mama dan Papa, terimakasih untuk tidak pernah lelah dan bosan mendengarkan keluh kesah, memberikan doa, semangat, motivasi, bantuan dan informasi. Kepada kedua adik Rian dan Arin, terimakasih motivasi, doa, dan dukungan dari jauh, kakak tunggu SS. Dan ST. kalian! Nana dan Zima, terimakasih telah menghibur. Kepada sanak saudara, dan seluruh keluarga besar. Terimakasih.

Kepada kedua pembimbing, Bapak Mahdi, SP, MSi, PhD dan Bapak Drs. Rusdja Rustam, MAg yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk memberi bimbingan, saran, dan arahan yang membangun. Terimakasih.

Buat teman-teman dan sahabat terbaik, Alin, Ucha, Intan, Tari, Vedor, Usi, Elok, Dona, Ian, Audi, Edo, Fandi, Ilham, Deddi, Rusdi, Wahyu, dan Anda. Its nice to having you guys in my life.

Kepada seluruh teman-teman Sosek '07 dan para senior yang telah membantu kelancaran proses skripsi ini. Terimakasih.

Last but not least kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan bantuan atas terlaksananya skripsi ini.

This tiny little piece means nothing without the involvement of you all.

Thank you.

BIODATA

Penulis dilahirkan di Bukittinggi, Sumatera Barat pada tanggal 13 September 1989 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan H. Tofer Indra, SE dan Hj. Desmiarti. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) ditempuh di SD Negeri 28 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan (1995-2001). Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ditempuh di SMP Negeri 20 Padang (2001-2004). Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ditempuh di SMA Negeri 6 Padang dan lulus pada tahun 2007. Pada tahun 2007 penulis diterima di Fakultas Pertanian Universitas Andalas Jurusan Sosial Ekonomi Program Studi Agribisnis.

Padang, Desember 2011

R.D.S

KATA PENGANTAR



Puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian yang berjudul **“Analisis Perbandingan Biaya Pengadaan Beras Oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat Dari Wilayah Jawa Timur Dengan Wilayah Sumatera Barat (Dengan Instrumen Harga Pembelian Pemerintah Dan Harga Riil Yang Berlaku)”**.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih setulusnya kepada Bapak Drs. Rusdja Rustam, M.Ag dan Bapak Mahdi, SP, M.Si, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah memberi arahan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada bapak ibu dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritikan dalam perbaikan skripsi ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas, bapak dan ibu staf pengajar Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Andalas beserta karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada Kadivreg, Kabid, Kasi, dan seluruh karyawan dan staf Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat, dan pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Teristimewa ucapan terima kasih untuk kedua orangtua yang telah memberi semangat dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna perbaikan menjadi karya yang lebih baik lagi. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Padang, Desember 2011

R.D.S

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Beras Sebagai Komoditi Pangan Utama	7
2.2 Konsep Ketahanan Pangan.....	8
2.3 Tugas dan Peran Perum Bulog Terkait Pengelolaan CBP	10
2.4 Manajemen Rantai Pasokan (<i>Supply Chain Management</i>) ...	13
2.5 Penelitian Terdahulu	14
2.6 Hipotesis Penelitian.....	15
III. METODOLOGI PENELITIAN	16
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	16
3.2 Metode Penelitian	16
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	16
3.4 Variabel yang Diamati	18
3.5 Analisis Data.....	20
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	21
4.1 Gambaran Umum Daerah Wilayah Kerja Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat.....	21
4.2 Tinjauan Umum Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat.....	23

4.3	Mekanisme Pengadaan Beras Oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat	28
4.4	Pengadaan Beras Dalam Negeri Sumatera Barat Melalui Mitra Kerja	32
4.5	Pengadaan Beras Dalam Negeri Nasional (<i>Move In Nasional</i>) Dari Jawa Timur	39
4.6	Penggudangan	42
4.7	Perbandingan Biaya Pengadaan Oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat	46
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	52
5.1.	Kesimpulan	52
5.2.	Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

<u>Tabel</u>	<u>Halaman</u>
1. Bentuk Format Penghitungan Biaya Pengadaan	20
2. Gambaran Umum Wilayah Kerja Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat Wilayah Padang Tahun 2010	21
3. Gambaran Umum Wilayah Kerja Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat Subdivre Bukittinggi Tahun 2010	22
4. Gambaran Umum Wilayah Kerja Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat Subdivre Solok Tahun 2010	23
5. Persyaratan Khusus Kualitas Beras.....	31
6. Realisasi Pengadaan Dalam Negeri Sumbar Oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat.....	33
7. Pengadaan <i>Move In</i> Dari Divre Jatim Pada Tahun 2009 dan 2010	41
8. Pemasukan, Pengeluaran, dan Persediaan Beras yang Disimpan di Gudang Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat Tahun 2009	43
9. Pemasukan, Pengeluaran, dan Persediaan Beras yang Disimpan di Gudang Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat Tahun 2010.....	44
10. Rincian Biaya Pengadaan <i>move in</i> dari Divre Jatim tahun 2009 dan 2010	46
11. Perbandingan Biaya Pengadaan Tahun 2009	47
12. Perbandingan Biaya Pengadaan Tahun 2010	48

DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar</u>	<u>Halaman</u>
1. Struktur Organisasi Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat	28
2. Grafik Gabungan Perbandingan Biaya Pengadaan Sumbar dan <i>Move In</i> , Volume ADA DN dan <i>Move In</i> , dan Produksi Beras Kualitas Pengadaan di Sumatera Barat.	49

DAFTAR LAMPIRAN

<u>Lampiran</u>	<u>Halaman</u>
1. Angkutan Beras Menurut Divre Pengirim dan Penerima Tahun 2009 dan 2010	56
2. Harga Rata-rata Beras Kualitas Medium di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 dan 2010	57
3. Luas Panen, Produksi, dan Rata-Rata Produksi Padi di Sumatera Barat Tahun 2006-2010	58
4. RKAP dan Realisasi Pengadaan DN Dari Wilayah Sumatera Barat Tahun 2009 dan 2010	59
5. Inpres RI No.1 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Perberasan.....	60
6. Inpres RI No.7 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Perberasan.....	66
7. Laporan Harga Perkembangan Rata-Rata Beras Tingkat Penggilingan Tahun 2009	73
8. Laporan Harga Perkembangan Rata-Rata Beras Tingkat Penggilingan Tahun 2010	74
9. Penerimaan Beras Move In Nas Divre Sumbar Tahun 2009 dan 2010.....	75
10. Laporan Penerimaan, Pendistribusian, dan Persediaan Beras Oleh Perum Bulog Divre Sumbar Tahun 2009.....	76
11. Laporan Penerimaan, Pendistribusian, dan Persediaan Beras Oleh Perum Bulog Divre Sumbar Tahun 2010.....	78
12. Perbedaan Pemingkatan Mitra Kerja Perum Bulog	80
13. Lokasi dan Kapasitas Tampung Gudang Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat.....	81
14. Perhitungan Biaya Pengadaan <i>Move In</i> dari Divre Jatim tahun 2009.....	82
15. Perhitungan Biaya Pengadaan <i>Move In</i> dari Divre Jatim tahun 2010.....	83

**ANALISIS PERBANDINGAN BIAYA PENGADAAN BERAS
OLEH PERUM BULOG DIVISI REGIONAL SUMATERA
BARAT DARI WILAYAH JAWA TIMUR DENGAN WILAYAH
SUMATERA BARAT**

**(Dengan Instrumen Harga Pembelian Pemerintah Dan Harga Riil
Yang Berlaku)**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sedikitnya penyerapan beras Pengadaan Dalam Negeri Sumatera Barat, sehingga Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat melakukan pengadaa *move in* dari Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur untuk memenuhi stoknya. Dari jumlah produksi dan harga, Sumatera Barat sendiri dinilai mampu untuk memenuhi pengadaan di wilayahnya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme pengadaan beras oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dan membandingkan antara biaya pengadaan beras CBP di Sumatera Barat dengan *move in* dari Divre Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan analisa data deskriptif dan kuantitatif

Dari hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme pengadaan beras yang dilakukan oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat selalu disesuaikan dengan pedoman umum pada tahun anggaran yang bersangkutan. Sepanjang tahun 2009 dan 2010 Pengadaan Dalam Negeri Sumatera Barat tidak terserap maksimal bahkan jauh dari prognosa awal tahun, pengadaan beras lebih banyak dilakukan dengan *move in* dari Perum Bulog Divre Jawa Timur. Perbedaan biaya *move in* dari Divre Jatim dengan harga riil di Sumbar tidak berbeda jauh. Pada tahun 2009 rata-rata biaya pengadaan di Sumbar dengan harga riil lebih rendah dibandingkan biaya *move in* dari Divre Jatim, dan pada tahun 2010 sebaliknya. Kemampuan Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dalam menyerap Pengadaan Dalam Negeri Sumatera Barat lebih banyak dipengaruhi oleh harga dibandingkan produksi.

Saran yang dapat diberikan penulis antara lain memberlakukan sistem insentif untuk dapat menyerap Pengadaan Dalam Negeri Sumatera Barat secara optimal dan mengaktifkan kembali fungsi Unit Pengolahan Gabah Beras (UPGB) dan mengoptimalkan peran Satuan Administrasi agar dapat melakukan pengadaan dalam bentuk gabah tidak hanya beras.

THE COMPARISON OF PROCUREMENT COST OF RICE BETWEEN LOCALLY-PRODUCED AND FROM EAST JAVA BY WEST SUMATRA OFFICE OF PERUM BULOG

ABSTRACT

West Sumatra office of Perum Bulog procures mostly rice from East Java, although procurement from locally-produced rice is highly possible as sufficient production in West Sumatra. This research studies the procurement procedures and compares rice procurement cost between locally-produced and from East Java.

The West Sumatra office of Perum Bulog has followed guidelines in rice procurement. In 2009 dan 2010 , procurement of locally-produced rice was lower than planned, although move in cost from East Java and local real price of rice was not significantly different. In 2009, real price of rice in West Sumatra was lower than *move in* cost from East Java. In 2010, real price of rice in West Suamtra contrastly higher than move in cost from East Java. Real price of locally-produced rice is main factor which affects volume of procurement of rice for local production.

Based on above findings, it is needed to provide incentive for local procurement through re-activating Bulog's rice milling unit and optimalizing administrative procurement to absorb not only rice but also unmilled-rice.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Peranan pertanian antara lain adalah menyediakan kebutuhan pangan yang dibutuhkan masyarakat untuk menjamin ketahanan pangan, menyediakan bahan baku industri, sebagai pasar potensial bagi produk-produk yang dihasilkan oleh industri, sumber tenaga kerja dan pembentukan modal yang diperlukan sektor lain, sumber perolehan devisa, mengurangi kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan, dan menyumbang pembangunan pedesaan dan pelestarian lingkungan hidup (Harianto, 2007).

Meskipun struktur dan afiliasi perekonomian Indonesia dewasa ini perlahan bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa tidak dapat dipungkiri komoditas beras tetap merupakan komoditas yang strategis, oleh kerennanya perhatian yang serius tetap diupayakan guna menjaga keberlangsungan produksi beras nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor. Dalam rangka membangun ketahanan pangan yang kuat diperlukan kebijakan yang komprehensif baik dalam peningkatan volume produksi, kualitas, maupun proteksi harga (BPS, 2010).

Menurut Amang (1995), pangan merupakan salah satu komoditi strategis berhubung bobotnya yang cukup besar dalam pengeluaran rumah tangga. Lebih khusus lagi, beras adalah komoditi yang sebelum perang sudah dilakukan campur tangan sistematis oleh pemerintah. Irawan (2005), mengatakan beras merupakan komponen pangan (bahan makanan) terbesar bagi penduduk yang selain jumlahnya banyak laju pertumbuhannya pun relatif masih tinggi. Selain itu permintaan dan konsumsi beras perkapita cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kegagalan pemerintah dalam menyediakan dan mengendalikan persediaan komoditas ini dipastikan akan memicu kerusuhan sosial.

Mengingat strategisnya kebutuhan pangan bagi masyarakat maka pemerintah mendirikan suatu lembaga yang khusus menangani masalah pangan terutama beras, yaitu Badan Urusan Logistik (Bulog) yang bertugas menjaga

kestabilan persediaan pangan nasional. Intervensi pemerintah di bidang pangan dilaksanakan pada berbagai aspek yang meliputi input produksi, proses produksi atau pasca panen. Khusus yang berkaitan dengan Bulog, intervensi tersebut dilakukan melalui penerapan kebijakan harga beras dan beberapa kegiatan yang dilakukan dibidang pengadaan, penyediaan, pemeliharaan stok, distribusi stok, serta penyaluran (Saifullah dan Sulandari, 2008).

Saifulah (2001) mengatakan mulai tahun 1998, Bulog kembali hanya menangani beras. Tugas yang diberikan kepada Bulog juga mengalami perubahan karena berubahnya kebijakan perberasan yang dilakukan pemerintah. Perlindungan kepada petani melalui harga dasar tetap menjadi prioritas utama. Sedangkan untuk stabilisasi harga konsumen mulai berkurang sejalan dengan terus tertekannya harga beras domestik. Pada tahun 2003 Bulog pun berubah bentuk dari Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) menjadi Perum. Perubahan bentuk ini juga berpengaruh terhadap peran dan fungsi Bulog itu sendiri. Selain masih mengemban beberapa tugas publik, Bulog yang sekarang juga berorientasi pada kegiatan komersil sebagaimana perusahaan lainnya.

Menurut Yonekura (2005), terdapat tiga perubahan mendasar dari reformasi Bulog ini. Pertama adalah perubahan peran dan fungsi dari semula memonopoli impor bahan pokok menjadi usaha yang berbisnis seperti perusahaan lain dengan peran monopoli yang sangat terbatas. Kedua adalah perubahan pembiayaan yang sebelumnya mendapatkan Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk melakukan operasinya, kini Bulog tidak memperoleh lagi, melainkan mesti membiayai dirinya sendiri melalui usaha yang dikelola. Sedangkan yang ketiga adalah perubahan dari sisi organisasi dan pengelolaan, jika sebelumnya Bulog langsung dibawah presiden yang pengelolaannya adalah seperti unit instansi pemerintah kini Perum Bulog adalah BUMN yang pengelolaannya seperti perusahaan lainnya. Prinsip-prinsip akuntansi seperti perusahaan swasta diterapkan pada Perum Bulog.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan, tugas publik Bulog pertama adalah melakukan pembelian gabah dan beras dalam negeri pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Tugas pengamanan HPP (sebelumnya menggunakan Harga Dasar) terus dilakukan sejak Bulog

berdiri tahun 1967 sampai dengan saat ini Bulog menjadi sebuah Perusahaan Umum. Pembelian gabah dan beras dalam negeri yang disebut sebagai Pengadaan Dalam Negeri merupakan satu bukti keberpihakan Pemerintah dalam hal ini Perum Bulog pada petani produsen melalui jaminan harga dan jaminan pasar atas hasil produksinya (Bulog, 2010).

Tujuan Pengadaan Beras Dalam Negeri sendiri antara lain agar petani/produsen mendapatkan harga minimal sama dengan HPP yang berlaku sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan dan produktifitas mereka. Selain itu digunakan untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP). CBP merupakan sejumlah beras tertentu milik Pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN dan dikelola oleh Bulog yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan beras dan dalam rangka mengantisipasi masalah kekurangan pangan, gejolak harga, keadaan darurat akibat bencana dan kerawanan pangan serta memenuhi kesepakatan Cadangan Beras Darurat ASEAN (Bulog, 2010). Dengan pengelolaan CBP ini Bulog dapat menjalankan fungsinya dalam efektifitas penyediaan pangan (*availability*).

Menurut Saifullah dan Sulandari (2008), dikarenakan potensi pengadaan dan penyaluran antar daerah berbeda, maka hasil pembelian beras di daerah surplus diangkut secara rutin ke daerah defisit agar pemerataan stok setiap daerah terjamin. Besarnya persediaan yang perlu diangkut ke suatu daerah diusulkan oleh Divisi Regional (Divre) ke kantor Pusat. Atas dasar usulan Divre, pertimbangan stok yang tersedia secara nasional serta besarnya tingkat stok minimum yang optimal di Divre tersebut maka kantor pusat melakukan pendistribusian beras dari persediaan beras di Divre surplus ke Divre defisit. Pada prinsipnya kebijakan memperkuat stok pangan diutamakan dari dalam negeri, dan hanya apabila belum mencukupi, tambahan dari impor dilakukan.

Untuk pemenuhan stok pengadaan berasnya, Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat melakukan pengadaan dari Perum Bulog Divre Jawa Timur dimana kegiatan ini dikenal dengan *move in* Nas. Disini Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat yang dalam hal ini disebut divre penerima melakukan *move in* Nas dari Bulog Divisi Regional Jawa Timur yang disebut sebagai divre pengirim. Pembelian dari Jawa Timur sendiri sudah rutin dilakukan Perum Bulog

Divisi Regional Sumatera Barat dengan jumlah pengadaan yang berbeda setiap periodenya. Pemilihan lokasi *move in* dari Jawa Timur sendiri diatur oleh Perum Bulog dengan pertimbangan selain produksi di daerah tersebut yang surplus (Lampiran 1), harga beras di Jawa Timur sendiri tergolong rendah (Lampiran 2), sehingga Perum Bulog masih bisa melakukan pembelian dengan Harga Pembelian Pemerintah¹.

Melihat fungsi dan peran Perum Bulog yang berorientasi pada tugas publik sekaligus komersil, maka pengadaan dapat dikaitkan kepada dua fungsi ini. Jika dilihat dari fungsi Perum Bulog yang berorientasi pada tugas publik maka Pengadaan Dalam Negeri (ADA DN) sebagai salah satu bukti keberpihakan pemerintah (Perum Bulog) pada produsen melalui jaminan harga, pembiayaan, dan jaminan pasar atas hasil produksinya. Sedangkan jika dilihat dari fungsinya sebagai perusahaan yang berorientasi komersil efektifitas pembiayaan khususnya saat melakukan pengadaan dapat menghemat pembiayaan yang dikeluarkan. Dengan mengetahui sejauh mana perbedaan biaya pengadaan *move in* dengan pengadaan dari Sumatera Barat dengan harga yang berlaku pada saat itu, Perum Bulog Divre Sumbar dapat mengetahui sejauh mana ia telah menjalankan perannya dalam pengamanan terhadap produsen sekaligus mengetahui efektifitas pembiayaan saat mengambil keputusan pengadaan.

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari ketersediaannya, produksi padi nasional cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 untuk wilayah Sumatera Barat produksi padi dalam lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan (Lampiran 3). Pada tahun 2010 produksi padi diperkirakan mencapai 2.192.288 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau mengalami peningkatan sebesar 86.498 ton (4,11 persen) dibandingkan produksi padi pada tahun 2009. Kenaikan produksi diperkirakan terjadi karena peningkatan luas panen sebesar 12.318 hektar (2,80 persen) dan produktivitas sebesar 0,61 kuintal/hektar (1,27 persen) (BPS, 2010).

¹ Wawancara dengan staf Perum Bulog Divre Sumbar pada tanggal 4 Februari 2011

Untuk tahun 2009 dan 2010 Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat menargetkan ADA DN Sumbar sebanyak 10.000 ton, namun realisasinya pada tahun 2009, 71,49 persen dari target dapat dipenuhi oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dari wilayahnya sedangkan tahun 2010 turun menjadi 46,98 persen (Lampiran 4), oleh karena itu Perum Bulog Divre Sumbar melakukan *move in* Nas lebih banyak dibandingkan pengadaan dalam negeri Sumbar sendiri. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan kenyataan dimana Sumatera Barat sebagai daerah surplus penghasil beras, maka seharusnya untuk pengadaan beras Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dapat dipenuhi oleh wilayahnya sendiri.

Pihak Bulog sendiri mengatakan realisasi pengadaan beras di wilayah Sumatera Barat tersebut disebabkan antara lain perkembangan harga gabah dan beras di tingkat produsen di beberapa daerah sentra produksi di Sumatera Barat cenderung masih cukup tinggi berada di atas HPP sedangkan untuk memenuhi stok pengadaannya Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat masih melakukan pembelian dengan HPP. Disamping itu sebagian besar produksi gabah dan beras Sumatera Barat banyak terserap oleh propinsi tetangga yakni Riau dan Jambi. Faktor lain yang mempengaruhi realisasi pengadaan beras Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat adalah periode masa tanam dan musim panen. Pada saat sentra produksi beras di Sumatera Barat sedang dalam masa tanam pengadaan beras tidak dapat dilakukan. Kegiatan pengadaan akan dilakukan kembali pada saat musim panen. Biasanya pada saat musim panen harga beras turun, sehingga Perum Bulog dapat melakukan pembelian dengan HPP yang berlaku².

Untuk memenuhi stok pengadaan tersebut Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat melakukan *move in* dari Perum Bulog Divre Jawa Timur dengan HPP. Permasalahan disini, meskipun untuk pembelian berasnya sendiri Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dikenakan tarif HPP, namun biaya tambahan seperti biaya transportasi dan bongkar muat (upah buruh) tetap dikeluarkan.

Sesuai Inpres No. 8/2008 (Lampiran 5) dan Inpres No. 7/2009 (Lampiran 6) tentang kebijakan perberasan, tarif HPP beras kualitas pengadaan untuk tahun

² Wawancara dengan staf Perum Bulog Divre Sumbar pada tanggal 4 Februari 2011

2009 adalah Rp 4.600 dan tahun 2010 adalah Rp 5.060 per-kg. Di Sumatera Barat sendiri harga beras kualitas medium atau setara kualitas pengadaan yang berasal dari daerah Pesisir Selatan di tingkat penggilingan berkisar antara Rp 4.625 – Rp 5.750 per-kg untuk tahun 2009 (Lampiran 7), sedangkan tahun 2010 berkisar antara Rp 5.500 – Rp 6.125 per-kg (Lampiran 8). Dari kondisi ini dapat dilihat harga yang berlaku untuk beras kualitas medium dari Sumatera Barat tidak jauh berbeda dengan HPP yang ditetapkan.

Dari uraian tersebut timbul pertanyaan bagaimana perbandingan harga yang dibayarkan oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dengan melakukan pengadaan *move in* Nas dari Divre Jawa Timur dengan HPP dan dikenakan biaya tambahan dengan harga riil beras yang berlaku di Sumatera Barat untuk memenuhi stok pengadaan berasnya. Untuk itu penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perbandingan Biaya Pengadaan Beras oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dari Wilayah Jawa Timur dengan Wilayah Sumatera Barat (Dengan Instrumen Harga Pembelian Pemerintah Dan Harga Riil Yang Berlaku)”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan mekanisme pengadaan beras yang dilakukan oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat.
2. Membandingkan antara biaya pengadaan beras CBP di Sumatera Barat dengan *move in* dari Divre Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait khususnya Perum Bulog dalam mengambil kebijakan terkait pengadaan beras Bulog.
2. Sebagai bahan referensi dan studi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Beras Sebagai Komoditi Pangan Utama

Sebagai bahan pangan utama di Indonesia, beras dibutuhkan oleh lebih dari 90% penduduk. Dewasa ini kebutuhan pangan nasional dipenuhi dari produksi beras dalam negeri. Pada saat terjadi anomali iklim seperti kekeringan atau ledakan hama penyakit yang berdampak terhadap penurunan produksi maka sebagian kebutuhan pangan dipenuhi dari impor (Warta Pertanian, 2005).

Idealnya, kebutuhan beras nasional dipenuhi dari produksi dalam negeri mengingat jumlah penduduk yang terus bertambah dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi dan tersebar di berbagai pulau. Kalau mengandalkan beras impor maka ketahanan pangan akan rentan dan berdampak luas terhadap berbagai aspek terutama ekonomi, sosial dan politik. Oleh karena itu upaya peningkatan produksi padi perlu digalakkan. Ditinjau dari ketersediaan sumber daya lahan dan teknologi yang telah dan akan dihasilkan melalui penelitian, Indonesia mempunyai peluang meningkatkan produksi padi menuju swasembada beras yang berkelanjutan (Warta Pertanian, 2005).

Beras memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia dipandang dari aspek ekonomi, tenaga kerja, lingkungan hidup, sosial, budaya dan politik. Masalah beras bukan hal yang sederhana dan sangat sensitif sehingga penanganannya harus dilakukan secara hati-hati. Kesalahan yang dilakukan dalam kebijaksanaan perberasan akan berdampak tidak saja pada kondisi perberasan nasional tetapi juga pada berbagai bidang lain yang terkait (Saifullah, 2001).

Konsep swasembada pangan yang selama ini dijadikan sebagai salah satu sasaran dalam pembangunan pertanian agaknya perlu disempurnakan. Hal ini diperlukan mengingat adanya kemungkinan timbulnya persepsi atas citra (*image*) bahwa ekonomi pangan adalah ekonomi subsistem. Apalagi apabila citra pangan itu adalah beras. Ini artinya seluruh sumber daya akan digunakan untuk memproduksi beras, padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa beras

bukanlah satu-satunya sumber pangan, terutama kalangan penduduk yang berpendapatan rendah (Pakpahan dan Pasandaran *cit* Silsia, 2007).

Mengendalikan kecukupan pangan terutama beras pada impor dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Beras yang perlu diimpor juga mungkin tersedia secukupnya karena *supply* beras di pasar Internasional relatif kecil dan tidak stabil. Oleh sebab itu Indonesia perlu mengadakan swasembada beras. Ini dapat dicapai karena sumberdaya alam kita memungkinkan dan tenaga kerja yang cukup tersedia (Asnawi, 1998).

Agar Indonesia dapat melestarikan swasembada beras, yang telah dicapai sejak 1894, minimum laju pertumbuhan beras Indonesia harus sama dengan laju pertumbuhan penduduk. Ini dengan asumsi bahwa kenaikan pendapatan penduduk tidak lagi meningkatkan konsumsi beras per kapita. Ada dua cara yang dapat melestarikan swasembada beras tersebut. Pertama, mengusahakan peningkatan produksi sesuai dengan konsumsi penduduk per kapita per tahun dengan jalan mengurangi makan beras, kekurangan diganti dengan bahan makanan yang lain. Kedua, mengusahakan memperkecil konsumsi beras per kapita per tahun (Asnawi, 1998)

2.2 Konsep Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan sebagai terjemahan istilah *food security*, ketahanan pangan diberikan pengertian sebagai suatu kondisi ketersediaan pangan cukup bagi setiap orang pada setiap saat dan setiap individu mempunyai akses untuk memperolehnya baik secara fisik maupun ekonomi. Dalam pengertian ini ketahanan pangan dikaitkan dengan 3 (tiga) faktor utama yaitu: (1) ketersediaan dan kecukupan pangan, (2) stabilitas ekonomi pangan (3) akses fisik maupun ekonomi bagi individu untuk mendapatkan pangan. Indonesia menerima konsep ketahanan pangan, yang dilegitimasi pada Undang-undang pangan Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Undang-Undang ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Arif, 2008)

Definisi Ketahanan pangan sebagai termuat dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1996 merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah

tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau (Arif, 2008). Menurut Hanani (2009) dari pengertian tersebut mewujudkan ketahanan pangan dapat lebih dipahami sebagai berikut: (a) terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak vitamin dan mineral serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia; (b) terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama; (c) terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan pangan yang harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air; (d) terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau.

Ketahanan pangan minimal harus dua unsur pokok, yaitu ketersediaan dan aksesstabilitas masyarakat terhadap pangan (Arifin, 2004). Sedangkan Khomsan (2004) berpendapat bahwa ketahanan pangan terdiri dari elemen: (1) ketersediaan pangan itu sendiri, (2) aksesibilitas yang menggambarkan kemampuan untuk menguasai pangan yang cukup, (3) keamanan yang dapat diartikan sebagai stabilitas (menunjukkan pada kerentanan internal seperti penurunan produksi) dan keandalan (menunjukkan pada kerentanan eksternal seperti fluktuasi perdagangan internasional), dan (4) keberlanjutan merupakan kontinuitas dari akses dan ketersediaan pangan yang ditunjukkan oleh keberlanjutan usaha tani.

Tujuan dari ketahanan pangan harus diorientasikan untuk pencapaian pemenuhan hak atas pangan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan ketahanan pangan nasional. Berjalannya sistem ketahanan pangan tersebut sangat tergantung pada dari adanya kebijakan dan kinerja sektor ekonomi, sosial dan politik. Kebijakan pemerintah dalam aspek ekonomi, sosial maupun politik sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan (Hanani, 2009).

2.3 Tugas dan Peran Perum Bulog Terkait Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

Perkembangan dan perjalanan Bulog mengalami banyak perubahan terhadap tugas dan fungsinya dalam penyediaan komoditas pangan dan stabilisasi harga. Perubahan tersebut tertuang dalam beberapa Keppres sejak tahun 1967 sampai 2003 sebagai landasan hukum beroperasinya (Sawit *et al*, 2003).

Berdirinya Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak dapat terlepas dari sejarah lembaga pangan di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai pemerintah sekarang ini. Setelah kemerdekaan, lembaga yang mengurus bahan makanan di Indonesia adalah Yayasan Bahan Makanan (BAMA). Kemudian berubah menjadi Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM) pada tahun 1952. Lalu pada tahun 1967 melalui Keppres RI No.114/U/KEP/5/1967 menjadi Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan tugas pokok melakukan stabilisasi harga beras. Kemudian tugas ini direvisi melalui Keppres No. 39 Tahun 1987 yang menyebutkan tugas Bulog mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas (Perum Bulog, 2008).

Pada tahun 1995 melalui Keppres No 50, tanggung jawab Bulog difokuskan pada peningkatan stabilisasi dan pengelolaan persediaan bahan pokok dan pangan dimana tugas pokok Bulog adalah mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, gandum, terigu, kedelai, pakan, dan bahan makanan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan bagi produsen dan konsumen serta memenuhi kebutuhan bahan pangan. Tugas tersebut lalu berubah dengan keluarnya Keppres No. 45 Tahun 1997 dimana komoditas yang dikelola Bulog dikurangi tinggal beras dan gula saja (Perum Bulog, 2010).

Sejak dikeluarkannya Keppres No. 19 Tahun 1998 ruang lingkup komoditas yang ditangani Bulog kembali dipersempit dengan kesepakatan oleh Pemertintah dengan IMF yang tertuang dalam *Letter of Intern (Lol)*. Dalam Keppres tersebut, tugas pokok Bulog dibatasi hanya untuk komoditas beras. Sedangkan komoditas lain yang dikelola selama ini dilepaskan ke mekanisme pasar (Sawit *et al*, 2003).

Sampai tahun 2002, status Bulog adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Namun sesuai Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2003, status Bulog mulai Januari 2003 diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum, *State Own Enterprise*) Bulog (Saifullah dan Sulandari, 2008). Dari sisi kelembagaan, terdapat tiga perubahan yang sangat mendasar dari reformasi Bulog ini (Yonekura, 2005). Pertama, perubahan peran dan fungsi dari semula memonopoli impor bahan makanan pokok dan mengendalikan harganya di pasar dalam negeri melalui operasi pasar, menjadi lembaga usaha yang berbisnis seperti lembaga lain dengan peran monopoli yang sangat terbatas. Perubahan kedua adalah sumber pembiayaan. Semula, Bulog mendapatkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk menopang operasinya ditambah dengan penerimaan dari operasi itu sendiri. Setelah di reform, Bulog sama sekali tidak dibenarkan lagi menerima BLBI, melainkan mesti membiayai dirinya melalui usaha yang dikelolanya. Ketiga, perubahan dari sisi organisasi dan pengelolaan. Semula Bulog adalah langsung dibawah presiden yang pengelolaannya adalah seperti unit instansi pemerintah. Setelah reformasi, Perum Bulog adalah BUMN yang pengelolaannya seperti perusahaan lainnya. Prinsip-prinsip akuntansi seperti perusahaan swasta diterapkan pada Perum Bulog.

Dibidang pelayanan publik, kegiatan Perum Bulog pada komoditi beras didasarkan pada Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Instruksi tersebut menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi nasional, peningkatan pendapatan petani, peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi pedesaan (Saifullah dan Sulandari, 2008).

Sampai saat ini tugas pokok yang dilaksanakan Bulog untuk beras, tidak banyak mengalami perubahan. Secara umum tugas tersebut mencakup kegiatan dalam rangka perlindungan kepada petani dan konsumen, penyediaan dan penyebaran stok, stabilisasi harga serta melayani kebutuhan beras bagi masyarakat. Kegiatan Bulog di bidang perberasan merupakan fungsi pelayanan publik yang meliputi: (1) melaksanakan Pengadaan Dalam Negeri untuk menjaga harga produsen (HPP) dan meningkatkan pendapatan petani, (2) melaksanakan penyaluran beras bersubsidi bagi rumah tangga miskin (program raskin), (3)

mengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk keperluan darurat, bencana alam dan stabilisasi harga di pasar konsumen (Saifullah dan Sulandari, 2008).

Ketiga pilar ketahanan pangan tersebut, saling terkait dan saling memperkuat satu dengan yang lain. Hasil pengadaan dalam negeri yang bertujuan untuk menjamin kebijakan HPP dapat digunakan untuk memperkuat CBP dalam rangka mengatasi instabilitas harga maupun untuk intervensi pasar pada situasi darurat, dan saat di mana pemasaran tidak dapat berfungsi dengan baik. Fungsi ini merupakan pilar bagi efektivitas penyediaan pangan (*availability*) (Saifullah dan Sulandari, 2008).

Keberhasilan menghimpun stok dari pengamanan HPP akan memperbaiki ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri. Di sisi lain, hal tersebut sekaligus akan membantu pendapatan jutaan petani kecil yang tersebar di berbagai tempat di tanah air. Dengan demikian, pilar ketersediaan (*availability*) dari ketahanan pangan dapat tercapai, sekaligus daya beli petani juga akan membaik (Saifullah dan Sulandari, 2008).

Hasil pengadaan dalam negeri juga akan digunakan untuk penyaluran Raskin kepada Rumah Tangga Miskin yang langsung diantar ke titik distribusi yang berdekatan dengan masyarakat miskin. Fungsi ini dalam ketahanan pangan akan memperkuat aksesibilitas (*accessibility*) masyarakat untuk mendapatkan pangan yang terjangkau secara fisik (akses fisik) dan harganya (akses ekonomi) (Saifullah dan Sulandari, 2008).

Pengelolaan CBP oleh Bulog merupakan wujud dari pilar ketiga ketahanan pangan. CBP memiliki peran strategis yang berfungsi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan. Fungsi ini merupakan pilar ketiga dalam ketahanan pangan berupa stabilitas (*stability*) (Saifullah dan Indiarjo, 2008).

CBP yang dimiliki oleh Indonesia sangat penting, terutama untuk mengatasi berbagai kemungkinan buruk akibat dari bencana alam, konflik sosial dan instabilitas harga. Indonesia adalah negara kepulauan dengan infrastruktur transportasi dan komunikasi yang relatif terbatas dengan pendapatan masyarakat yang relatif rendah sehingga stok beras untuk keadaan darurat menjadi penting dan perlu dikuasai dan dikelola dengan baik. Dengan CBP, Pemerintah memiliki

kemampuan besar untuk melakukan intervensi pasar dan untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana di seluruh wilayah Indonesia (Saifullah dan Indiarto, 2008).

Pengelolaan CBP semakin penting karena perkembangan situasi pasar internasional yang cenderung bergejolak dan potensi bencana yang semakin sering. Disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut, hingga saat ini, sebagian besar pengeluaran rumah tangga masih untuk kebutuhan pangan, sehingga ketidakstabilan harga pangan akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan riil masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan rendah, yang akan mengurangi daya beli mereka terhadap pangan (Saifullah dan Indiarto, 2008).

2.4 Manajemen Rantai Pasokan (*Supply Chain Management*)

Pengertian *supply chain* adalah sebuah proses bisnis dan informasi yang berulang yang menyediakan produk atau layanan dari pemasok melalui proses pembuatan dan pendistribusian kepada konsumen. Menurut Simchi-Levi *et al* (2000) SCM adalah suatu pendekatan dalam mengintegrasikan berbagai organisasi yang menyelenggarakan pengadaan atau penyaluran barang, yaitu *supplier, manufacturer, warehouse* dan *stores* sehingga barang-barang tersebut dapat diproduksi dan didistribusikan dalam jumlah yang tepat, lokasi yang tepat, waktu yang tepat dan biaya yang seminimal mungkin. Rantai ini juga merupakan jaringan dari berbagai organisasi yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu sebaik mungkin menyelenggarakan pengadaan atau penyalur barang tersebut.

Menurut (Heizer dan Render, 2006), rantai pasokan sendiri (*supply chain*) merupakan salah satu dari 10 keputusan strategi manajemen operasi. Tujuan *supply chain* manajemen berdasarkan definisi diatas adalah: (1) menyangkut pertimbangan mengenai lokasi setiap fasilitas yang memiliki dampak terhadap aktivitas dan biaya dalam rangka memproduksi produk yang diinginkan pelanggan dari supplier dan pabrik hingga disimpan di gudang dan pendistribusiannya ke sentra penjualan, (2) mencapai efisiensi aktivitas dan biaya seluruh sistem, total

biaya sistem dari transportasi hingga distribusi persediaan bahan baku, proses kerja dan barang jadi.

Apabila mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi SCM adalah: (a) kegiatan merancang produk baru (*product development*) - kegiatan mendapatkan bahan baku (*procurement*); (b) kegiatan merencanakan produksi dan persediaan (*planning and control*) - kegiatan melakukan produksi (*production*); (c) kegiatan melakukan pengiriman (*distribution*). Ukuran performansi SCM: (1) kualitas (tingkat kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, ketepatan pengiriman); (2) waktu (*total replenishment time, business cycle time*); (3) biaya (*total delivered cost*, efisiensi nilai tambah); (4) fleksibilitas (jumlah dan spesifikasi) SCM juga bisa diartikan jaringan organisasi yang menyangkut hubungan ke hulu (*upstream*) dan ke hilir (*downstream*), dalam proses yang berbeda dan menghasilkan nilai dalam bentuk barang/jasa .

2.5 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Silsia (2007) yang berjudul Analisa Peranan Perum Bulog Subdivisi Regional Bukittinggi Dalam Mengendalikan Harga Gabah dan Beras Pada Wilayah Kerjanya menunjukkan bahwa tidak terdapat pengadaan beras dalam negeri Sumbar oleh Perum Bulog Subdivisi Regional Bukittinggi, padahal produksi padi pada wilayah kerja Perum Bulog Subdivisi Regional Bukittinggi lebih besar dibandingkan dua wilayah kerja lainnya. Pengadaan lebih banyak dilakukan dari *move regional (move reg)* dari Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat.

Selanjutnya penelitian Kudiarto (2005) yang berjudul Analisis Persediaan Gabah Pada Unit Penggilingan Gabah-Beras Soekarno-Hatta Perum Bulog Divisi Regional Lampung dengan menggunakan model *Economic Order Quantity (EOQ)* menunjukkan hasil selama 2001-2004 perusahaan belum mampu mengadakan pengendalian gabah secara optimum. Hal ini dapat kita lihat dari pembelian per pesan gabah yang dilakukan oleh pihak manajemen UPGB Soekarno-Hatta pada tahun 2000 sebanyak 1.707,142 karung, tahun 2001 sebanyak 1.914,285 karung, tahun 2002 sebanyak 1.942,857 karung, tahun 2003

sebesar 2.614,174 karung dan tahun 2004 sebanyak 2.591,930 karung. Sedangkan menurut Penghitungan *Economic Order Quantity (EOQ)* didapatkan besaran jumlah per pesan yang ekonomis untuk tahun 2000 sebesar 2.418,06 karung, tahun 2001 sebesar 2.544,01 karung, tahun 2002 sebesar 2.667,80 karung, tahun 2003 sebesar 2.614,17 karung dan tahun 2004 sebesar 2.591,93 karung.

Penelitian Silsia (2007) menganalisa mekanisme pengadaan sebagai instrumen dalam pengendalian harga. Sedangkan Kudiarto (2005) menganalisa biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas pengadaan bahan baku gabah yang akan diolah menjadi beras. Penelitian yang dilaksanakan ini melihat perbandingan biaya pengadaan beras dari Jawa Timur dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dibandingkan jika melakukan pembelian dengan harga riil di Sumatera Barat.

2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis tidak lain adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau yang ingin dipelajari. Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks (Nazir, 2003).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka hipotesis yang dapat digunakan pada penelitian ini adalah “biaya jika melakukan pengadaan dari Sumatera Barat lebih besar dibandingkan biaya melakukan pengadaan *move in* dari Divre Jawa Timur”.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat yang berlokasi di Jalan MH. Thamrin No.24 Padang. Pemilihan lokasi dilakukan dengan sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan (1) Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat melakukan pengadaan *move in* Nas dari Perum Bulog Divre Jawa Timur untuk memenuhi stok CBP Sumatera Barat, (2) Perum Bulog Sumatera Barat merupakan badan yang bertanggung jawab langsung atas keluar masuknya beras CBP di Sumatera Barat. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Agustus 2011 sampai September 2011.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode studi kasus. Studi kasus adalah metode riset yang menggunakan berbagai sumber data (sebanyak mungkin data) yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis. Hasil akhir metode ini adalah deskripsi detail dari topik yang diteliti (Nazir, 2003). Melalui metode ini penulis memperoleh gambaran secara lebih terperinci mengenai Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat baik latar belakang, sifat-sifat atau karakter-karakter, yang kemudian akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Sesuai dengan tujuan, penelitian ini tidak menggunakan sejumlah sampel untuk menggambarkan populasi yang ada, tetapi perusahaan ini yang menjadi objek penelitian dan langsung dijadikan sebagai sumber data.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan:

- a. Staff Perum Bulog Divisi Regional Sumatra Barat terutama Seksi Pengadaan dan Harga Pasar, Seksi Persediaan dan Perawatan, dan Seksi Angkutan dan Penyaluran yang terlibat langsung dalam pengadaan beras Perum Bulog Divisi Regional Sumatra Barat. Data primer yang dikumpulkan adalah:
 - i. Sistem pengadaan beras oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatra Barat baik ADA DN Sumbar maupun *move in* Nas.
 - ii. Faktor pendukung dan penghambat Perum Bulog Divisi Regional Sumatra Barat dalam melakukan pengadaan beras. Faktor pendukung dan penghambat ini dilihat dari segi pendanaan, waktu atau periode pengadaan, harga beras yang berlaku, dan kualitas beras.
- b. Mitra yang terlibat dalam pengadaan gabah dan beras pada wilayah kerja Padang. Mitra yang dijadikan sumber wawancara adalah PT. Roni MP yang berlokasi di Pesisir Selatan. Pemilihan mitra ini dilakukan secara sengaja atau *purposive*. Adapun yang mendasari pengambilan mitra ini adalah karena mitra ini merupakan mitra kerja penyalur beras ADA DN Sumbar dengan peringkat *gold* (tertinggi), dimana mitra kerja ini yang paling banyak menyalurkan beras ADA DN Sumbar untuk Perum Bulog Divre Sumbar. Data yang dikumpulkan dari mitra kerja adalah sistem kerjasama dan faktor pendukung dan penghambat dalam berkerjasama dengan Perum Bulog Divre Sumbar dalam Pengadaan beras dalam negeri ini.

2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui:

- a. Laporan-laporan Perum Bulog Divisi Regional Sumatra Barat. Data sekunder yang dikumpulkan adalah :
 - 1) Laporan harga rata-rata beras kualitas medium di tingkat penggilingan di Sumatera Barat selama tahun 2009 dan 2010.
 - 2) Laporan Persediaan dan Penyaluran Beras oleh Perum Bulog Divisis Regional Sumatera Barat tahun 2009 dan 2010.
 - 3) Reencana Keerja Pendapatan dan Anggaran (RKAP) dan Realisasi Pengadaan Dalam Negeri Sumbar tahun 2009 dan 2010.

4) Statistik angkutan beras tahun 2009 dan 2010.

Data sekunder diatas merupakan data bulanan yang diambil dari laporan bulanan Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat pada satu tahun anggaran berdasarkan tahun kalender selama dua tahun pengamatan yaitu dimulai pada Januari 2009 hingga Desember 2010. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa harga dasar gabah dan harga pembelian beras oleh Perum Bulog setiap tahun dihitung mulai bulan Januari yang dikeluarkan setiap tahun anggaran berdasarkan Instruksi Presiden. Sedangkan periode pengamatan selama 2 tahun ini didasarkan atas realisasi ADA DN Sumbar pada tahun 2010 yang turun drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 2009.

- b. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Data sekunder yang dikumpulkan adalah:
 - 1) Data jumlah penduduk dan rumah tangga miskin seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.
 - 2) Data produksi padi seluruh dan Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat pada tahun 2009. Sedangkan utuk data tahun 2010 belum diterbitkan oleh pihak BPS Sumbar.
- c. Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat. Data yang dikumpulkan adalah data produksi bulanan padi di Pesisir Selatan untuk tahun 2009 dan 2010.

3.4 Variabel yang Diamati

Untuk mencapai tujuan pertama dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan mekanisme pengadaan beras yang dilakukan oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat, variabel yang diamati adalah:

- 1. Keadaan Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat. Adapun variabel yang diamati adalah:
 - a. Gambaran umum daerah wilayah kerja Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat, mencakup seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

- b. Tinjauan umum Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dilihat dari tugas pokok dan fungsi Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat, dan struktur organisasi Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat.
2. Mekanisme pengadaan beras oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat. Adapun variabel yang diamati adalah:
- a. Kualitas dan kriteria beras pengadaan oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat
 - b. Waktu atau periode pengadaan beras dan sistem yang dijalankan.
 - c. Daerah-daerah yang menjadi sumber persediaan beras ADA DN Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat.
 - d. Jumlah beras (ton) yang dapat diakomodir setiap bulannya oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat pada tahun anggaran 2009 dan 2010.
 - e. Sistem pembelian beras yang dilakukan baik melalui Mitra Kerja atau melalui *move in*. Sistem yang dijalankan haruslah sesuai pedoman umum yang telah dibuat pada tahun anggaran tersebut.
 - f. Sistem penggudangan beras yang dilakukan.

Untuk mencapai tujuan kedua yaitu membandingkan antara biaya pengadaan beras CBP di Sumatera Barat dengan dari Jawa Timur, variabel yang diamati adalah:

- a. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk beras dalam negeri yang diberlakukan pada saat periode penelitian yakni HPP tahun 2009 dan 2010.
- b. Harga riil beras (rata-rata bulanan) untuk kualitas pengadaan pada tingkat penggilingan di Sumatera Barat pada tahun 2009 dan 2010.
- c. Harga riil beras (rata-rata bulanan) untuk kualitas pengadaan di Jawa Timur pada tahun 2009 dan 2010.
- d. Komponen biaya pengangkutan yang dikeluarkan dalam melakukan pengadaan tahun 2009 dan 2010 baik dari Jawa Timur dan Sumatera Barat.

3.5 Analisis Data

Analisa data yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan diantaranya adalah:

1. Untuk mencapai tujuan pertama yaitu mendeskripsikan mekanisme pengadaan beras yang dilakukan oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dianalisa secara deskriptif, yaitu membuat gambaran mengenai mekanisme pengadaan beras oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat.
2. Untuk mencapai tujuan kedua yaitu membandingkan antara biaya pengadaan beras CBP di Sumatera Barat dengan *move in* dari Jawa Timur, dilakukan analisa kuantitatif:

Untuk menghitung biaya pengadaan *move in* dari Perum Bulog Divre Jawa Timur:

$$\text{Total biaya pengadaan} = \text{HPP} + \text{Biaya Pengangkutan}$$

$$\text{Biaya pengangkutan} = \text{biaya bongkar muat (upah buruh)} + \text{biaya transportasi kapal} + \text{biaya transportasi}$$

Tabel 1. Bentuk Format Penghitungan Biaya Pengadaan

Komponen Biaya	Total
1. Harga Pembelian Pemerintah	(a)
2. Biaya Pengangkutan:	
a. Biaya bongkar muat	xx
b. Biaya transportasi kapal	xx
c. Biaya transportasi truk	xx
Total biaya pengangkutan	(b)
3. Total Biaya Pengadaan	(c)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Wilayah Kerja Perusahaan Umum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat

Perusahaan Umum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat memiliki Sub-divisi yang terletak di lokasi yang berbeda, yakni wilayah Padang, Subdivisi Regional Bukittinggi dan Subdivisi Regional Solok, dimana masing-masing wilayah dan subdivisi memiliki daerah wilayah kerja yang berbeda.

4.1.1 Wilayah Padang

Untuk lebih jelasnya mengenai masing-masing daerah, dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2. Gambaran Umum Wilayah Kerja Perum Bulog Divre Sumbar Wilayah Padang Tahun 2010

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk	Jumlah RT miskin	Produktifitas (ton/ha)	Produksi Padi (ton)
1	Kota Padang	833.562	29.661	5,20	70.045
2	Kota Pariaman	78.552	1.780	4,04	22.358
3	Kab. Padang Pariaman	392.941	19.855	4.53	220.604
4	Kab. Pesisir Selatan	448.488	30.619	4,76	250.958
5	Kab. Kepulauan Mentawai	70.174	17.711	3.42	393

Sumber: BPS, 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk wilayah kerja Padang, produksi padi paling banyak dihasilkan dari Kabupaten Pesisir Selatan, selain itu beras untuk Pengadaan Dalam Negeri Sumatera Barat sebagian besar berasal dari daerah ini. Hal tersebut merupakan salah satu faktor Perum Bulog dalam menyerap ADA DN. Untuk data jumlah penduduk dan rumah tangga miskin merupakan salah satu hal yang juga dipertimbangkan oleh Perum Bulog dalam melakukan penyaluran berasnya. Selain Kabupaten Pesisir Selatan, daerah lain yang dapat menyalurkan beras ADA DN untuk Perum Bulog Divre Sumbar adalah

Kabupaten Padang Pariaman, namun dari wilayah ini hanya sedikit sekali produksi yang bisa terserap untuk dijadikan sebagai ADA DN Sumbar.

4.1.2 Subdivisi Regional Bukittinggi

Gambaran mengenai wilayah kerja Subdivisi Regional Bukittinggi, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Gambaran Umum Wilayah Kerja Perum Bulog Divre Sumbar Subdivre Bukittinggi Tahun 2010

No	Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk	Jumlah RT miskin	Produktifitas (ton/ha)	Produksi Padi (ton)
1	Kota Bukittinggi	107.805	3.165	5,57	4.484
2	Kota Payakumbuh	106.911	3.671	4,44	32.065
3	Kota Padang Panjang	54.880	886	5,07	8.302
4	Kab. Pasaman	263.780	21.800	4,19	185.761
5	Kab. Pasaman Barat	338.567	24.179	3,71	99.552
6	Kab. 50 Kota	336.067	17.817	4,66	217.482
7	Kab. Agam	451.264	18.686	5,34	278.032

Sumber: BPS, 2010

Untuk penyerapan pengadaan dari wilayah Subdivisi Regional Bukittinggi, sangat sedikit sekali bahkan hampir tidak pernah. Walaupun pada Tabel 3 produksi dari wilayah kerja ini cukup banyak namun beras tersebut tetap tidak bisa terserap oleh Perum Bulog, dikarenakan mutu dan harga yang tidak sesuai, beras dari wilayah kerja Subdivre Bukittinggi ini umumnya terserap oleh Provinsi Riau dan Medan.

4.1.3 Subdivisi Regional Solok

Untuk lebih jelasnya mengenai masing-masing daerah, dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4. Gambaran Umum Wilayah Kerja Perum Bulog Divre Sumbar Subdivre Solok Tahun 2010

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk	Jumlah RT miskin	Produktifitas (ton/ha)	Produksi Padi (ton)
1	Kota Solok	60.530	1.928	6.08	15.241
2	Kota Sawahlunto	55.291	1.904	4.63	12.258
3	Kab. Sijunjung	209.335	9.106	4.35	56.307
4	Kab. Tanah Datar	340.773	15.628	5.63	228.928
5	Kab. Solok Selatan	133.861	9.699	5,47	147.259
6	Kab. Solok	359.819	23.753	4,95	276.114
7	Kab. Dharmasraya	186.354	5.590	4.53	56.307

Sumber: BPS, 2010

Dilihat dari produktivitas wilayah kerja Subdivre Solok cenderung lebih tinggi dari pada dua wilayah kerja lainnya, meskipun begitu Pengadaan Dalam Negeri Sumatera Barat hampir tidak pernah terserap dari wilayah kerja ini, khususnya produksi dari daerah Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Sijunjung. Hal ini dikarenakan beras yang berasal dari wilayah ini jauh berada diatas Harga Pembelian Pemerintah. Selain faktor jumlah penduduk, permintaan akan produksi dari daerah-daerah ini sangat tinggi ini merupakan faktor lain beras dari wilayah ini mampu diserap sebagai Pengadaan Dalam Negeri.

4.2 Tinjauan Umum Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat

Pembahasan tentang tinjauan Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dilihat dari tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasinya.

a. Tugas dan Fungsi Perum Bulog

Perum Bulog mempunyai tugas menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Jaminan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah/beras, stabilisasi harga, pengelolaan kepada golongan masyarakat tertentu (Raskin), dan pengelolaan

cadangan pangan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka ketahanan pangan.

Dalam menjalankan tugasnya Perum Bulog mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan bidang operasi;
2. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan dan *Information Technology (IT)*;
3. Penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan;
4. Penyelenggaraan kegiatan di bidang sumberdaya manusia dan umum;
5. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan Perum Bulog;
6. Pengelolaan kesekretariatan perusahaan;
7. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia;
8. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

b. Tugas dan Fungsi Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat

Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perum Bulog di bidang pelayanan publik, perencanaan dan pengembangan usaha, administrasi dan keuangan di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya Perum Bulog Divisi Regional mempunyai fungsi-fungsi:

1. Pelaksanaan pengendalian kegiatan di bidang publik;
2. Pelaksanaan pengendalian kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan usaha;
3. Pengelolaan kegiatan di bidang administrasi dan keuangan;
4. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
5. Pengelolaan sumberdaya bagi terlaksananya tugas Divisi Regional dan Subdivisi Regional secara berdaya guna dan berhasil guna;
6. Pelaksanaan hubungan kerja dan kemitraan dengan instansi pemerintah, badan usaha lain, dan masyarakat di regional dan wilayah kerjanya.

c. Struktur Organisasi Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat

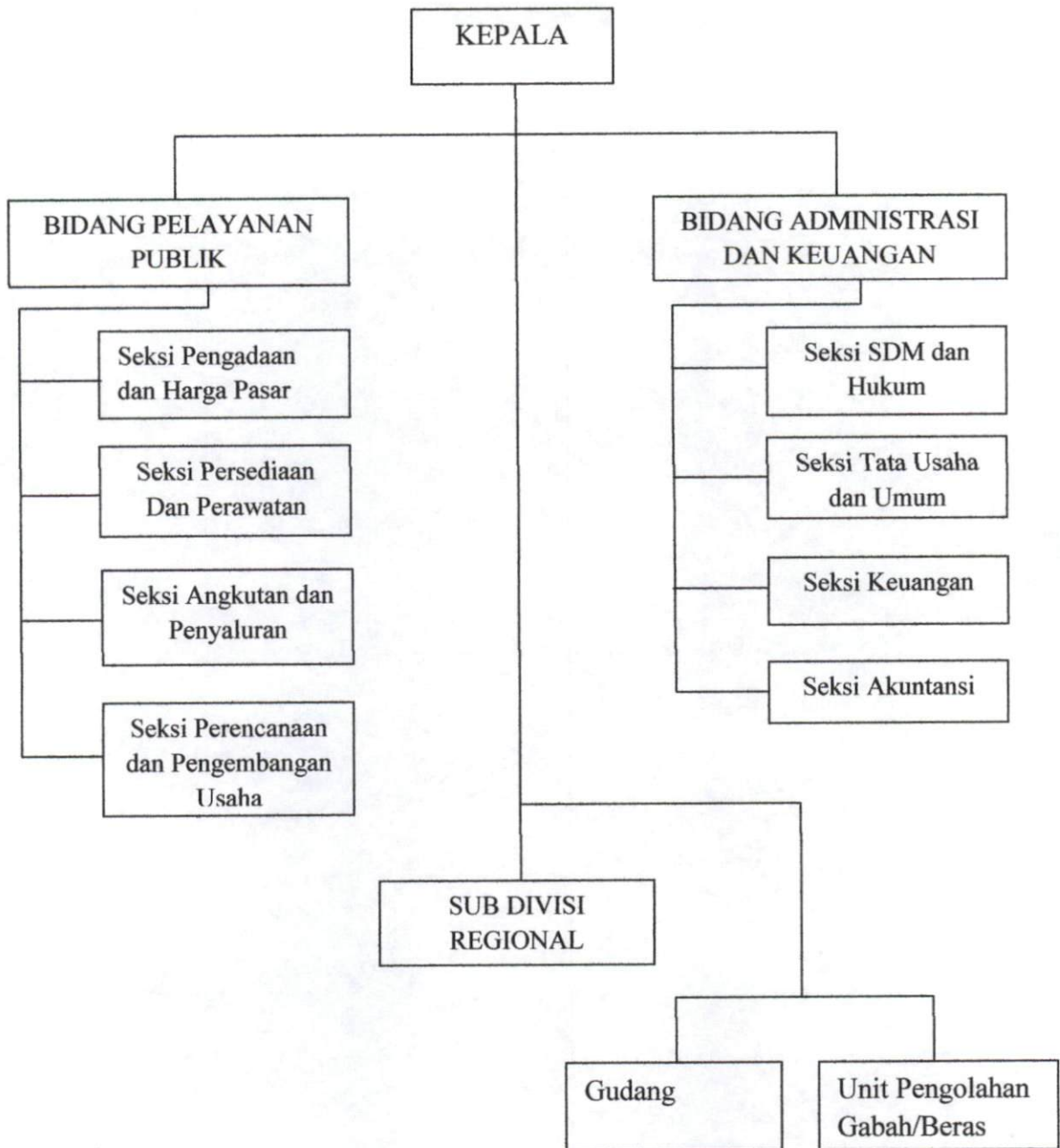
Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat merupakan Divre tipe II dengan susunan organisasi terdiri dari:

1. Kepala, mempunyai tugas:
 - i. Memimpin Divre sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - ii. Membina sumber daya Perum Bulog di lingkungan Divre;
 - iii. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan publik, perencanaan dan pengembangan usaha, administrasi dan keuangan;
 - iv. Melaksanakan kerjasama dengan badan usaha lain atau instansi pemerintah.
2. Bidang Pelayanan Publik, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, mengendalikan, dan mengevaluasi serta melaksanakan kegiatan, analisa harga dan pasar serta pengadaan gabah/beras, persediaan dan perawatan kualitas serta penyaluran angkutan. Bidang Pelayanan Publik mempunyai fungsi merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemantauan dan analisa harga pasar dan pengadaan gabah/beras, pengelolaan persediaan, perawatan kualitas, pemberantasan hama, dan pelayanan penyaluran beras. Bidang ini mengepalai:
 - a) Seksi Pengadaan dan Harga Pasar, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, memonitor dan mengevaluasi serta melakukan kegiatan perhitungan prakiraan jumlah dan biaya pengadaan gabah/beras, serta kegiatan monitoring, analisa, dan pengamatan perkembangan harga dan pasar di tingkat produsen dan konsumen serta penyusunan data statistik seluruh komoditi;
 - b) Seksi Persediaan dan Perawatan, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, memonitor dan mengevaluasi serta melakukan kegiatan pengolahan laporan sistem informasi persediaan dan penyebaran persediaan, perhitungan kebutuhan biaya penyimpanan/sewa gudang, serta inspeksi kualitas, perhitungan kebutuhan biaya perawatan dan obat-obatan, pengendalian aplikasi teknis penyimpanan, sanitasi gudang dan lingkungannya, pemberantasan dan pengendalian hama gudang, dan pengolahan hasil pemeriksaan kualitas;

- c) Seksi Angkutan dan Penyaluran, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, memonitor dan mengevaluasi serta melakukan kegiatan angkutan, pembongkaran, dan pemuatan barang serta administrasinya dan pelayanan penyaluran beras kepada kelembagaan pemerintah dan masyarakat umum dan khusus meliputi penyiapan surat perintah setor, deliveri order, nota tagihan, berita acara penyerahan, daftar penyimpulan, perjanjian jual beli dan konsinyasi serta pengolahan laporan/sistem informasi penyaluran;
 - d) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, memonitor dan mengevaluasi serta melakukan kegiatan perencanaan dan pengembangan industri, perdagangan, jasa dan melayani sistem informasi di lingkungan Divre.
3. Bidang Administrasi dan Keuangan, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, memonitor dan mengevaluasi serta melakukan kegiatan pengelolaan sumberdaya manusia dan hukum, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta umum, kehumasan, pengelolaan anggaran dan pembiayaan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Divre. Bidang Administrasi dan Keuangan mempunyai fungsi merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan administrasi sumberdaya manusia, urusan hukum dan klaim, surat menyurat, arsip, hubungan masyarakat dan kerumahtanggaan, kegiatan pengelolaan anggaran, pembiayaan dan verifikasi, kegiatan administrasi pembukuan, neraca, dan laporan pertanggungjawaban keuangan. Bidang ini mengepalai:
- a) Seksi SDM dan Hukum, mempunyai tugas merencanakan, melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan administrasi sumberdaya manusia dan urusan hukum serta klaim dan tuntutan ganti rugi;
 - b) Seksi Tata Usaha dan Umum, mempunyai tugas merencanakan, melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan surat menyurat, arsip, ekspedisi, keprotokolan, kerumahtanggaan dan pengolahan pengadaan, pemeliharaan perlengkapan sarana kantor, rumah dinas, mess, pergudangan, inventaris serta penghapusan;

- c) Seksi Keuangan, mempunyai tugas merencanakan, melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan administrasi pembiayaan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan penerimaan, pencocokan dokumen dan menyelesaikan tagihan/piutang, penyusunan serta penyediaan pengalokasian anggaran serta analisa kebutuhan anggaran;
 - d) Seksi Akuntansi, mempunyai tugas merencanakan, melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan administrasi pembukuan, neraca laporan pertanggungjawaban keuangan dan hubungan rekening antar kantor.
4. Sub Divisi Regional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Perum Bulog dibidang pelayanan publik, perencanaan dan pengembangan usaha, serta administrasi dan keuangan di wilayah kerjanya. Subdivre berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Divre.
 5. Gudang, adalah instalasi yang dipergunakan untuk menyimpan barang komoditi Perum Bulog yang pengelolaannya baik secara administratif maupun operasional dilakukan oleh Divre dan Kasubdivre. Gudang mempunyai tugas melakukan urusan pemasukan, penyimpanan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditi Perum Bulog serta administrasi keuangan, sumberdaya manusia dan ketatausahaan. Gudang Bulog dipimpin oleh seorang Kepala Gudang. Kepala Gudang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kadivre atau Kasubdivre sesuai kedudukannya.
 6. Unit Pengolahan Gabah/Beras (UPGB), mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melaksanakan kegiatan unit pabrikasi mulai dari pembelian bahan baku, pengolahan, dan pengawasan mutu sampai dengan menghasilkan produk utama maupun hasil samping yang siap untuk dipasarkan sesuai dengan permintaan pasar ataupun industri lainnya. UPGB berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kadivre atau Kasubdivre sesuai dengan kedudukannya.

Struktur organisasi Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat secara lebih detail dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat

4.3 Mekanisme Pengadaan Beras oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat

Pengadaan beras oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat adalah kegiatan pelaksanaan pembelian beras yang dilakukan oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dalam rangka penugasan Kegiatan Pelayanan

Publik berdasarkan ketentuan Inpres RI tentang kebijakan yang berlaku melalui Mitra Kerja Pengadaan Dalam Negeri dan pengadaan nasional (*move in Nas*).

Pengadaan beras yang dilakukan oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat berbeda menurut tujuan dan dari daerah mana beras tersebut berasal. Jenis-jenis pengadaan beras oleh Perum Bulog Divre Sumbar antara lain:

1. Pengadaan Dalam Negeri Sumatera Barat (ADA DN Sumbar), merupakan pengadaan beras dimana beras tersebut berasal dari daerah di Sumatera Barat saja (dari seluruh daerah di wilayah kerja Perum Bulog Divre Sumbar). Yang termasuk pengadaan jenis ini adalah:
 - a) Pengadaan Lokal adalah pengadaan beras dalam negeri yang dilakukan antar daerah dalam satu wilayah kerja Subdivre, seperti pengadaan dari Gudang Mata Air di Padang ke gudang di Pesisir Selatan dan sebaliknya.
 - b) Pengadaan Regional adalah pengadaan beras dalam negeri yang dilakukan antar wilayah kerja dalam Subdivre yang berbeda, seperti pengadaan dari Gudang Mata Air di Padang ke Gudang Tanjung Pati di Payakumbuh.
2. Pengadaan Dalam Negeri yang dilakukan antar Divisi Regional (antar provinsi) dikenal dengan istilah *Move Nas*. Jika Perum Bulog Divre Sumbar menerima beras pengadaan dari Divre lain maka disebut *Move In Nas*, sedangkan jika Perum Bulog mengirimkan beras pengadaan ke Divre lain disebut *Move Out Nas*.
3. Pengadaan dari luar negeri (ADA LN) atau impor adalah pengadaan yang diterima dari negara lain seperti Thailand dan Vietnam.

Dalam melakukan pengadaan beras, Perum Bulog memprioritaskan Pengadaan Dalam Negeri Sumatera Barat. Jika Pengadaan Dalam Negeri Sumatera Barat tidak mencukupi, maka Perum Bulog Sumatera Barat melakukan pengadaan dari daerah lain dari Divre yang berbeda yang selanjutnya disebut *move in Nasional (move in Nas)*. Sejak tahun 2009, Perum Bulog Sumatera Barat melakukan *move in* dari wilayah Jawa Timur saja (Lampiran 9). Untuk pengadaan dari luar negeri (import) sangat tidak diprioritaskan kecuali pada saat keadaan

mendesak, dan telah mendapat persetujuan dari Perum Bulog Pusat (import sepenuhnya diatur oleh Perum Bulog Pusat). Seperti pada bulan November 2010 Perum Bulog Divre Sumbar mendapatkan sekitar 8.000 ton beras import, dikarenakan pada bulan tersebut baik Pengadaan Dalam Negeri Sumatera Barat maupun *Move In Nas* tidak masuk satupun (Lampiran 10). Sedangkan pada tahun 2009 Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat tidak menerima beras impor sama sekali (Lampiran 11).

Untuk daerah pemasok Pengadaan Dalam Negeri Sumatera Barat, Perum Bulog tidak menetapkan daerah mana yang harus menjadi pemasok beras untuk dijadikan stok CBP. Daerah mana saja di Sumatera Barat bisa memasok beras pengadaan, asalkan beras tersebut sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang akan dijadikan beras pengadaan dan bisa dibeli dengan Harga Pembelian Pemerintah. Pada tahun 2009 dan 2010 beras pengadaan CBP paling banyak diperoleh dari daerah Pesisir Selatan dan sedikit sekali dari daerah lain seperti Padang Pariaman. Untuk produksi beras dari daerah seperti Bukittinggi, Solok, Payakumbuh hampir tidak pernah diserap untuk dijadikan beras pengadaan, dikarenakan harga beras yang terlalu tinggi dan mutu berasnya diatas kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.

Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat melakukan Pengadaan Beras Dalam Negeri Sumatera Barat melalui mitra-mitra kerja yang telah ditunjuk. Sedangkan dalam melakukan *move in* beras hanya dikirim dari gudang penyimpanan di Divisi Regional Jawa Timur ke gudang penyimpanan di Padang.

Kualitas beras Pengadaan Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan Inpres RI tentang kebijakan perberasan yang berlaku. Komponen persyaratan kualitas untuk beras terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus.

1) Persyaratan Umum

- a) Bebas hama dan penyakit yang hidup, maksudnya bebas dari kehadiran hama (serangan hama, ulat, dan lain sebagainya) dan atau penyakit (cendawan) yang hidup yang terdapat pada contoh beras yang akan diperiksa.

- b) Bebas bau busuk, asam dan bau-bau asing lainnya menyangkut bau yang dapat ditangkap oleh indra penciuman (hidung) pada contoh beras yang diperiksa.
- c) Bersih dari campuran dedak dan katul, maksudnya tidak ada dedak dan katul yang terlepas (bebas).
- d) Bebas dari tanda-tanda adanya bahan kimia yang membahayakan baik secara visual maupun secara organoleptik yaitu sisa-sisa bahan kimia lainnya yang membahayakan kesehatan/keselamatan manusia.

2) Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus kualitas beras dapat dilihat pada Tabel 5. Derajat sosoh adalah terlepasnya sebagian besar lapisan katul, lembaga dan sedikit endosperm dari butir beras sehingga sisa yang belum lepas sebesar 5%.

Kadar air merupakan jumlah kandungan air di dalam butiran beras yang dinyatakan dalam satuan persen dari berat basah (*wet basis*).

Butir beras kepala (*head rice*) adalah penjumlahan butir beras utuh dan butir beras patah (*big broken*). Butir utuh (*whole kernel*) adalah butir beras baik, sehat maupun cacat, yang utuh (10/10) tanpa ada bagian yang patah.

Tabel 5. Persyaratan Khusus Kualitas Beras

No.	Komponen Mutu	Satuan	Mutu
1	Derajat Sosoh	%	95
2	Kadar air (max)	%	14
3	Beras Kepala (Min)	%	78
	Butir Utuh (Max)	%	35
4	Butir Patah (Max)	%	20
5	Butir Menir (Max)	%	2
6	Butir Merah (Max)	%	3
7	Butir Kuning/rusak (Max)	%	3
8	Butir Mengapur (Max)	%	3
9	Benda asing (Max)	%	0,02
10	Butir Gabah (Max)	/butir/100g	1
11	Campuran Varietas Lain (Max)	%	5

Sumber: Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat, 2010

Butir patah adalah butir beras patah, baik sehat maupun cacat yang mempunyai ukuran lebih kecil dari ($<6/10$) bagian tetapi lebih besar dari ($>2/10$) bagian panjang rata-rata butir beras utuh.

Butir merah adalah butir beras utuh, kepala, patah dan menir yang 25% atau lebih permukannya diselimuti oleh kulit ari yang berwarna merah atau seluruh endospermnya berwarna merah.

Butir kuning adalah butir beras utuh, kepala, patah dan menir yang berwarna kuning, kuning kecoklat-coklatan, atau kekuning-kuningan (kuning semua). Butir rusak adalah butir beras utuh, kepala, patah dan menir yang rusak dan berubah warna karena air, hama/penyakit, panas dan sebab-sebab lain.

Butir mengapur adalah butir beras separoh bagiannya atau lebih berwarna putih seperti kapur (*chalky*) dan bertekstur lunak. Benda asing adalah benda-benda asing yang tidak tergolong beras misalnya jerami atau batu-batu kerikil, tangkai padi dan lain sebagainya.

Butir gabah adalah butir beras yang sekamnya belum terkupas atau hanya terkupas sebagian, termasuk dalam kategori butir beras patah yang masih bersekam. Campuran varietas lain adalah campuran varietas yang bukan varietas dominan dari beras tersebut termasuk beras ketan.

Beras yang berasal dari mitra ADA DN akan dapat masuk ke gudang-gudang Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat apabila telah memenuhi syarat-syarat dan administrasi beras yang telah ditetapkan.

4.4 Pengadaan Beras Dalam Negeri Sumatera Barat Melalui Mitra Kerja

Pengadaan Beras Dalam Negeri (ADA DN) Sumatera Barat adalah kegiatan pembelian beras dalam negeri yang berada di wilayah Sumatera Barat berdasarkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang berlaku melalui mitra ADA DN. Adapun tujuan ADA DN ini untuk:

1. Agar petani produsen mendapatkan harga gabah minimal sama dengan HPP yang berlaku sehingga mendorong peningkatan pendapatan petani produsen pangan;
2. Menyediakan stok bagi pemerintah untuk keperluan:
 - a) Beras untuk masyarakat miskin (RASKIN) dan rawan pangan;

- b) Golongan anggaran dan perusahaan milik negara/swasta;
- c) Operasi Pasar Murni (OPM);
- d) Memenuhi bahan baku industri;
- e) Cadangan pangan nasional , kebutuhan bencana alam/sosial lainnya.

Hasil pengadaan dari Mitra Kerja ini nantinya hanya untuk memenuhi kebutuhan penyaluran setempat dan tidak diperbolehkan untuk kepentingan *move out* Nasional (antar Divre). Realisasi ADA DN Sumbar pada dua tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Realisasi Pengadaan Dalam Negeri Sumbar oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat Tahun 2009 dan 2010

No.	Bulan	2009 (ton)	2010 (ton)
1	Januari	-	-
2	Februari	-	-
3	Maret	-	440,13
4	April	-	2.209,79
5	Mei	773,82	1.068,51
6	Juni	1.268,52	597,12
7	Juli	1.246,42	104,33
8	Agustus	2.216,48	210
9	September	1.106,08	35,25
10	Oktober	240	33,18
11	November	293,73	-
12	Desember	94,28	-

Sumber: Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat, 2010

Mitra Kerja Perum Bulog merupakan bagian dari mata rantai suplai sistem logistik Perum Bulog dalam rangka kegiatan pengadaan gabah/beras dalam negeri. Mitra kerja juga berperan dalam penentuan faktor kualitas dan kuantitas gabah/beras yang diterima Perum Bulog.

Kemitraan gabah/beras dalam negeri adalah hubungan kerja antara Perum Bulog dan Mitra Kerja berdasarkan landasan kemitraan dan mengacu pada prinsip-prinsip kemitraan dalam melaksanakan pengadaan gabah/beras dalam negeri. Dalam melakukan kegiatan Pengadaan Beras Dalam Negeri yang umumnya disebut ADA DN Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat hanya

terlibat langsung dengan Mitra Kerja yang bersangkutan. Tidak ada lembaga lain yang terlibat didalamnya.

Fungsi Mitra Kerja ADA DN adalah menjembatani Perum Bulog dengan petani/kelompok tani dan pelaku tataniaga beras dalam melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang perberasan nasional. Selain itu memberikan kontribusi melalui Perum Bulog dalam rangka pemupukan cadangan pangan nasional.

Adapun peran mitra kerja sendiri antara lain:

1. Melaksanakan pembelian hasil produksi usaha tani khususnya gabah dalam negeri dalam rangka mengamankan harga produksi padi petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Mitra tidak boleh melakukan pembelian di bawah HPP yang telah disepakati pada saat penandatanganan kontrak kerjasama. Disini PT. Roni MP tidak pernah membeli gabah dari petani dibawah HPP yang telah ditetapkan pemerintah.
2. Mengolah dan memasarkan hasil produksi petani kepada Perum Bulog.

Dalam melakukan pengadaan beras kepada Perum Bulog Divre Sumbar, PT. Roni MP selaku Mitra Kerja selalu melakukan pembelian gabah kepada petani sesuai dengan HPP untuk gabah yang telah ditetapkan sebelumnya melalui Inpres yang berlaku yakni Rp 2.400 pada tahun 2009 dan Rp 2.640 pada tahun 2010. Dalam melakukan pembelian gabah kepada petani PT. Roni MP akan membeli sebanyak mungkin gabah yang bisa dibayarkan dengan HPP untuk kemudian disimpan atau langsung diolah. Setelah diolah menjadi beras barulah PT. Roni MP menyalurkan beras-beras tersebut ke Perum Bulog Divre Sumbar. Perum Bulog Divre Sumbar akan melakukan pembayaran sesuai HPP pembelian beras yakni Rp 4.600 pada tahun 2009 dan Rp 5.060 pada tahun 2010.

Persyaratan Mitra Kerja Perum Bulog antara lain:

1. Persyaratan Administrasi:
 - a) Memiliki perjanjian yang sah dan masih berlaku (valid) antar alain: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Pendirian Penggilingan Padi (SIPPP), Surat Keterangan Tidak Mengganggu Lingkungan (HO), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) bagi mitra yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), akta

notaris penguasaan dan menggunakan penggilingan, kuasa notaris dari pemilik penggilingan.

- b) Dalam satu Subdivre dan Divre yang melaksanakan operasi pengadaan dalam negeri setiap Mitra Kerja Pengadaan Dalam Negeri hanya diperbolehkan mengajukan satu nama perusahaan penggilingan padi sebagai Mitra Kerja.
 - c) Penambahan Mitra Kerja Pengadaan Dalam Negeri dipersyaratkan bagi perusahaan penggilingan padi yang telah berpengalaman di bidang perdagangan dan pengolahan gabah/beras minimal satu tahun.
2. Persyaratan Teknis:
- a) Memiliki dan/atau menguasai secara sah sarana dan prasarana pengeringan gabah/beras, yaitu: mesin pengering dan/atau lantai jemur.
 - b) Memiliki dan/atau menguasai secara sah sarana dan prasarana pengolahan padi, yaitu: Mesin Pemecah Kulit (*Paddy Husker*); Mesin Pembersih Sekam (*Husk Blower*); Mesin Pemisah Gabah, Beras Pecah Kulit (*Paddy Separator*); Mesin Penyosoh (*Polisher*); Mesin Pemisah Menir (*Rice Shifter*); Mesin Pemisah Katul (*Bran Shifter*); Mesin Jahit (*Sewing Machine*).
 - c) Dalam melakukan proses giling tidak dibenarkan menggunakan mesin *polisher* yang memiliki air sebagai pengkabur (*steam polisher*), karena akan mempengaruhi mutu beras. Sehingga mutu dan kualitas beras yang ditetapkan pemerintah tidak dicapai. Dalam rangka mencapai mutu beras yang ditetapkan terutama dalam hal kadar air, PT. Roni MP memiliki alat pengukur kadar air, sehingga dalam melakukan pengadaan beras untuk Perum Bulog ia tidak kesulitan lagi.
 - d) Diharapkan memiliki operator yang menguasai operasi dari masing-masing mesin yang dipunyai dan dianjurkan pernah mengikuti pendidikan/pelatihan pasca panen yang dilaksanakan oleh Perum Bulog atau instansi lain yang berwenang.

Selain persyaratan yang harus diberlakukan kepada Mitra Kerja terdapat pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh Perum Bulog Divre Sumbang kepada Mitra Kerja. Pelayanan dan fasilitas tersebut berupa:

1. Pelayanan

Pelayanan standar diberikan kepada semua Mitra Kerja pada seluruh peringkat dalam lingkup pelayanan yang berkualitas. Pelayanan yang diberikan antara lain:

- a) Keramahan,
- b) Kejelasan informasi.
- c) Kesempatan konsultasi.
- d) Penerimaan barang di gudang sesuai ketentuan.
- e) Perlindungan atas keamanan.
- f) Penanganan keluhan.
- g) Penagihan dan pembayaran atas barang yang diterima

2. Fasilitas

Selain pelayanan standar, Mitra Kerja diberikan fasilitas yang sesuai dengan peringkat masing-masing Mitra Kerja. Fasilitas tersebut antara lain:

- a) Mitra Kerja Bronze, diberikan fasilitas:
 - i. Besar kontrak pengadaan beras: untuk kapasitas giling 0,2 – 1 ton/jam: minimal 50 ton sampai dengan maksimal 200 ton per kontrak, tempo kontrak maksimal 30 hari. Untuk kapasitas giling >1 – 3 ton/jam: minimal 200 ton sampai maksimal 400 ton per kontrak, maksimal 30 hari. Untuk kapasitas giling >3 ton/jam: minimal 700 ton per kontrak, tempo kontrak maksimal 30 hari.
 - ii. Kemudahan pembayaran: standar.
 - iii. Lokasi penyimpanan: gudang Bulog.
 - iv. Prioritas giling: pertama.
 - v. Pengadaan: setempat.
 - vi. Harga pembelian: HPP
- b) Mitra Kerja Silver, diberikan fasilitas:
 - i. Besar kontrak pengadaan beras: untuk kapasitas giling >1 – 3 ton/jam: minimal 400 ton sampai maksimal 700 ton per kontrak, maksimal 30 hari. Untuk kapasitas giling >3 ton/jam: minimal 700 ton per kontrak, tempo kontrak maksimal 30 hari.
 - ii. Kemudahan pembayaran: standar.

- iii. Lokasi penyimpanan: gudang Bulog.
 - iv. Prioritas giling: kedua.
 - v. Pengadaan: setempat dan lokal.
 - vi. Harga pembelian: HPP
- c) Mitra Kerja Gold, diberikan fasilitas:
- i. Besar kontrak pengadaan beras: untuk kapasitas giling >3 ton/jam: minimal 1000 ton per kontrak, tempo kontrak maksimal 30 hari.
 - ii. Kemudahan pembayaran: transfer, sesuai permintaan Mitra Kerja.
 - iii. Lokasi penyimpanan: gudang Bulog atau gudang non Bulog/filial.
 - iv. Prioritas giling: terakhir.
 - v. Pengadaan: setempat, lokal, dan regional.
 - vi. Harga pembelian: HPP.

3. Apresiasi

Apresiasi diberikan kepada Mitra Kerja berdasarkan penilaian dan evaluasi kinerja, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Baik Sekali, diberikan tambahan besaran kontrak pengadaan sebesar 20% dari kontrak awal selama tidak melebihi kapasitas giling.
- b) Baik, diberikan tambahan besaran kontrak sebesar 10% dari kontrak awal selama tidak melebihi kapasitas giling.
- c) Cukup Baik, Kurang Baik, Tidak Baik, tidak diberikan apresiasi.

PT. Roni MP selaku mitra kerja disini memiliki gudang penyimpanan milik pribadi yang berfungsi menyimpan beras yang ia miliki sebelum disalurkan ke gudang penyimpanan milik Perum Bulog Divre Sumbar. Sehingga disini PT. Roni MP memiliki keuntungan dapat menyerap gabah dari petani sebanyak-banyaknya sehingga nantinya juga dapat menyalurkan beras pengadaan semaksimal mungkin dan pada akhirnya mampu menekan biaya yang dikeluarkan dalam menyalurkan beras ke Perum Bulog. Manfaat lain yang dirasakan mitra kerja dalam menjalin kerjasama dengan Perum Bulog Divre Sumbar antara lain:

- a. Pasar yang jelas dan pasti. Mitra tidak kesulitan lagi mencari lembaga niaga dalam menyalurkan beras yang ia miliki. Setelah ia menjual beras

kepada Perum Bulog maka untuk tahap pendistribusian selanjutnya menjadi tanggung jawab Perum Bulog.

- b. Kepastian harga dan pembayaran. Harga yang mereka terima telah jelas karena telah ditentukan melalui inpres dan telah disepakati diawal transaksi. Harga ini mencakup harga beras saat penyerahan di depan gudang Perum Bulog. Pembayaran disesuaikan dengan harga yang telah disepakati pada saat penandatanganan kontak jual beli antara mitra dengan Perum Bulog Divre Sumbar. Jika melakukan jual beli dengan pihak lain harga dan kepastian pembayaran tidak jelas dan rentan penipuan.

Prosedur pengadaan melalui Mitra Kerja dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Kadivire mengajukan usulan rencana pengadaan lokal/regional kepada kantor Pusat Perum Bulog yang meliputi: alasan/dasar melakukan pengadaan, kuantum, asal beras, destinasi barang dan insentif yang diperlukan serta perkembangan harga beras di tingkat penggilingan di daerah asal beras.
2. Berdasarkan usulan rencana tersebut, dengan berbagai pertimbangan di Kantor Pusat, Direksi menyetujui atau menolak usulan Kadivire.
3. Apabila disetujui, maka pengadaan dapat dilakukan.
4. Pelaksanaan pengadaan:
 - a) Pengadaan lokal adalah seluruh mitra kerja divre setempat yang diatur melalui peringkat Bronze, Silver, Gold (Lampiran 12)
 - b) Pengadaan regional adalah mitra kerja divre asal beras yang diatur melalui pemeringkatan mitra kerja khususnya Silver dan Gold (lebih diutamakan yang peringkat Gold).
5. Prosedur pengadaan lokal dan regional sebagai berikut:
 - a) Mitra mengajukan permohonan pengadaan beras kepada Kadivire/Kasubdivre pelaksana pengadaan lokal maupun regional. Untuk pengadaan regional, mitra kerja harus melampirkan rekomendasi Kadivire dari Divre asal beras bahwa mitra kerja tersebut layak melaksanakan pengadaan regional.

- b) Berdasarkan permohonan tersebut Kadivre/Kasubdivre menentukan jumlah, waktu, dan tempat pelaksanaan pengadaan. Penentuan jumlah disesuaikan dengan kapasitas sarana penggilingan yang dimiliki mitra
- c) Kadivre/Kasubdivre membuat Perjanjian Jual Beli (PJB) pengadaan beras untuk Mitra Kerja, serta menerbitkan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) untuk kepala gudang dan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (SPPK) untuk Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK).
- d) Mitra kerja membuat surat pernyataan (pakta integritas) bahwa beras yang diserahkan/dimasukkan ke gudang Bulog merupakan hasil panen tahun berjalan dan telah memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan Perum Bulog.
- e) Mitra kerja menyerahkan beras sesuai PJB/SPK dan SPT ke gudang yang ditunjuk untuk diperiksa oleh PPK.
- f) Berdasarkan SPPK, PPK melakukan pemeriksaan kualitas beras di depan pintu gudang Bulog atau tempat lain yang ditentukan Kadivre/Kasubdivre yang meliputi : kuantum, kualitas beras, kemasan serta label/sablon pada karung sesuai Tata Cara Pemeriksaan Kualitas Gabah, Beras dan Kemasannya.
- g) Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas oleh PPK yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Kualitas (RPK), Kepala Gudang menerima, menolak, atau meminta analisa ulang terhadap kualitas beras yang diserahkan mitra kerja.
- h) Beras yang memenuhi persyaratan diterima oleh Kepala Gudang untuk kemudian disimpan di Gudang Bulog.
- i) Atas penyerahan beras kepada kepala gudang, mitra kerja berhak memperoleh Rekap Penerimaan Barang dan Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK).

4.5 Pengadaan Beras Dalam Negeri Nasional (*Move In Nasional*) dari Jawa Timur

Apabila Pengadaan Dalam Negeri Sumbar melalui Mitra Kerja ADA DN pada seluruh wilayah kerja Perum Bulog Sumatera Barat tidak memenuhi

kebutuhan penyaluran beras minimal tiga bulan penyaluran beras, maka beras akan didatangkan dari daerah (antar Divisi Regional) lain yang selanjutnya disebut dengan *move in*. Tidak ada jangka waktu yang baku untuk melakukan *move in* ini. Apabila persediaan di gudang dinilai sudah tidak mencukupi untuk penyaluran tiga bulan berikutnya maka Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat akan mengajukan surat permintaan beras kepada Perum Bulog berpatokan kepada penyaluran bulan sebelumnya. Dari surat permohonan yang diajukan tersebut, Perum Bulog akan memilih dari daerah mana beras akan disalurkan. Daerah tersebut adalah daerah surplus akan beras yang paling dekat dengan Divre penerima. Maka pada tahun 2009 dan 2010 Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat menerima pengadaan *move in* dari Divisi Regional Jawa Timur. Selain produksi beras Jawa Timur dinilai surplus, harga rata-rata beras kualitas medium di daerah tersebut relatif lebih rendah dibandingkan harga beras kualitas medium di Sumatera Barat (Lampiran 2).

Beras *move in* didatangkan dari Divre surplus (pengirim) ke Divre defisit (penerima) atas rujukan dari Perum Bulog. Beras tersebut dibeli oleh Divre penerima dengan Harga Pembelian Pemerintah kepada Divre pengirim, dan biaya pengadaan *move in* ini yang mencakup ongkos angkut (laut/darat) dan upah buruh ditanggung oleh Divre pengirim yakni Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat. Sedangkan biaya lain seperti, biaya penyusutan dan pemeliharaan beras selama di kapal menuju pelabuhan ditanggung oleh pihak kapal dan asuransi.

Dari Tabel 7, terlihat bahwa pengadaan *move in* pada tahun 2009 adalah sebesar 81.496,597 ton dan tahun 2010 sebanyak 22.850,353 ton. Jika dibandingkan dengan Tabel 6 sebelumnya pengadaan *move in* ini jumlah jauh lebih banyak dibandingkan dengan pengadaan DN Sumbar melalui Mitra Kerja Perum Bulog Divre Sumbar. Hal ini terjadi karena harga beras di tingkat petani Sumbar sudah berada di atas HPP sehingga Bulog tidak melakukan pembelian. Sehingga petani merasa lebih untung jika menjual berasnya keluar daerah karena harga yang ditawarkan pihak luar (selain Bulog) baik pedagang daerah maupun pedagang antar daerah jauh berada di atas HPP. Selain itu beberapa penggilingan skala kecil atau KUD yang bekerjasama dengan Mitra Kerja Perum Bulog Divre Sumbar yang memutuskan kontrak kerja karena masalah HPP yang dinilai kecil tadi.

Sementara itu, Perum Bulog Divre Sumbar harus mengisi gudang-gudang di wilayah kerjanya minimal untuk tiga bulan penyaluran, sehingga harus mendatangkan beras dari Divre Jatim.

Tabel 7. Pengadaan *Move In* dari Divre Jawa Timur Pada Tahun 2009 dan 2010

No.	Bulan	2009 (ton)	2010 (ton)
1	Januari	12.655,37	7.500,00
2	Februari	-	-
3	Maret	5.352,77	5.500,00
4	April	447,23	-
5	Mei	18.392,74	3.466,44
6	Juni	8.116,93	1.947,99
7	Juli	414,09	-
8	Agustus	4.000,00	5.000,00
9	September	7.300,00	5.000,00
10	Oktober	-	6.358,52
11	November	11.487,86	-
12	Desember	13.329,60	3.610,51
Total		81.496,59	22.850,36

Sumber: Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat, 2010

Pengadaan dari *move in* dari Divre Jatim ini merupakan opsi kedua dalam rangka pemenuhan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Opsi lain yang bisa dilakukan Perum Bulog Divre Sumbar untuk memenuhi stok CBP adalah pengadaan Luar Negeri (ADA LN), namun ADA LN ini tidak dianjurkan selama stok ADA DN Sumbar dan *move in* masih bisa mencukupi, setidaknya untuk stok minimal 3 bulan kedepan. Pengadaan beras luar negeri ini sepenuhnya diatur oleh Perum Bulog Pusat jika stok nasional sudah tidak mencukupi pengadaan di wilayah kerja. Perum Bulog hanya boleh melakukan impor beras dalam rangka menunjang kebijakan pangan tingkat domestik.

Pada tahun 2009 Perum Bulog Divre Sumbar sama sekali tidak melakukan ADA LN, sedangkan tahun 2010 terdapat beras ADA LN sebanyak 10.392,13 ton. Jika dilihat pada Lampiran 10 Perum Bulog melakukan mendapat beras ADA LN pada bulan November dan Desember, hal ini dikarenakan pada bulan Desember stok CBP hanya masuk melalui *move in* sebanyak 4.844,03 ton dan pengadaan dalam negeri Sumbar tidak masuk sama sekali. Sedangkan pada bulan November

baik pengadaan dalam negeri Sumbar maupun melalui *move in* tidak ada sama sekali, sehingga Perum Bulog Divre Sumbar mendapat beras impor sebanyak 8.429,36 ton.

4.6 Penggudangan

Gudang mempunyai tugas melakukan urusan pemasukan, penyimpanan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditi Perum Bulog serta administrasi keuangan, sumber daya manusia serta ketatausahaan. Perum Bulog Divre Sumbar memiliki sebelas unit gudang yang tersebar diseluruh wilayah kerjanya. Gudang yang terdapat pada wilayah kerja Perum Bulog Divre Sumbar memiliki kapasitas tampung yang berbeda di sesuaikan dengan banyaknya kebutuhan penyaluran dan pengadaan di masing-masing daerah. Untuk lebih jelasnya mengenai nama lokasi dan kapasitas tampung masing-masing gudang dapat dilihat pada Lampiran 13.

Untuk Pengadaan Dalam Negeri Sumbar, beras yang dikirim oleh Mitra Kerja akan disimpan pada gudang yang paling dekat dengan lokasi Mitra Kerja. Jika beras ADA DN lebih banyak diserap di daerah Pesisir Selatan, maka beras akan disimpan terlebih dahulu di gudang Perum Bulog Pesisir sebelum nantinya didistribusikan ke daerah lain. Untuk pengadaan dari Mitra Kerja, PT. Roni MP memiliki dua gudang penyimpanan yakni di Pesisir dan Padang sebelum beras tersebut disalurkan ke gudang milik Perum Bulog. Jika pengadaan dibutuhkan untuk wilayah Padang, maka PT. Roni MP akan menyalurkan stok yang telah disimpan di Padang, begitu pula untuk daerah Pesisir. Biaya penyaluran dari gudang milik mitra ke gudang Perum Bulog dikeluarkan oleh Mitra Kerja.

Sedangkan untuk pengadaan *move in* Nas dari Perum Bulog Divre Jatim, beras disimpan di gudang terdekat dengan Pelabuhan Teluk Bayur, yakni Gudang Mata Air dan Gudang Ampalu. Beras-beras tersebut terlebih dahulu disimpan di kedua gudang sebelum nantinya disalurkan lebih lanjut untuk *move* lokal, *move* regional, dan *move out* nas.

Persediaan yang harus dikuasai oleh masing-masing gudang Perum Bulog Divre Sumbar adalah untuk minimal tiga bulan penyaluran. Kebutuhan persediaan minimal dikuasai tersebut diperhitungkan atas kebutuhan minimum yang harus tersedia atau *Minimum Stock Requirement* (MSR). Namun jika persediaan

nasional cukup besar dan berada diatas MSR, maka kebutuhan persediaan yang harus dikuasai itu harus disesuaikan dengan kapasitas gudang yang dimiliki oleh Perum Bulog Divre Sumbar. Kapasitas minimum tersedian ini disebut *Maximum Space Capacity* (MSC).

Gudang merupakan bagian penting dalam proses pengadaan gabah dan beras yang berkaitan dengan kualitas beras baik pada saat penyimpanan atau pada saat pelaksanaan perawatan. Persediaan beras di gudang oleh Perum Bulog Divre Sumbar tidak memperhitungkan permintaan dan penawaran yang ada di pasar tapi hanya memperhitungkan persediaan beras berdasarkan penyaluran beras yang telah dilakukan sebelumnya.

Tabel 8. Pemasukan, Pengeluaran, dan Persediaan Beras yang Disimpan di Gudang Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat Tahun 2009 (ton).

No.	Bulan	Persediaan Awal	Jumlah Pemasukan	Persediaan yang Dikuasai	Jumlah Pengeluaran	Persediaan Akhir
1	Januari	10,895.57	12,668.82	23,564.39	1,230.79	22,333.60
2	Februari	22,333.60	984.29	23,317.89	6,582.93	16,734.96
3	Maret	16,734.96	9,671.20	26,406.16	13,072.34	13,333.82
4	April	13,333.82	5,108.69	18,442.51	10,153.21	8,289.30
5	Mei	8,289.30	22,094.86	30,384.16	8,293.54	22,090.62
6	Juni	22,090.62	12,743.87	34,834.49	14,335.05	20,499.44
7	Juli	20,499.44	4,983.93	25,483.37	8,894.38	16,588.99
8	Agustus	16,588.99	6,864.75	23,453.74	8,447.22	15,006.52
9	September	15,006.52	10,387.18	25,393.70	7,895.28	17,498.42
10	Oktober	17,498.42	3,863.92	21,362.34	12,582.89	8,779.45
11	November	8,779.45	15,341.62	24,121.07	15,280.23	8,840.84
12	Desember	8,840.84	19,859.25	28,700.09	11,615.00	17,084.85

Sumber: Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat, 2010

Persediaan beras di gudang dilakukan dengan cara *First in First out* (FIFO) yaitu beras yang pertama kali masuk ke gudang adalah beras yang pertama kali pula akan disalurkan ke konsumen. Apabila penyaluran beras yang dilakukan sedikit sementara jumlah beras di gudang terus bertambah maka akan terjadi penumpuan beras sehingga terjadi penurunan kualitas beras.

Penurunan kualitas beras yang berada di gudang dapat terjadi karena beberapa hal:

1. Proses pengangkutan. Pada saat proses pengangkutan terutama pada saat bongkar muat beras adakalanya petugas tidak memerhatikan cara bongkar muat beras tersebut. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah terjadinya kebocoran pada karung beras sehingga mengharuskan para petugas gudang untuk merenovasi kembali karung beras yang telah bocor tersebut dengan menjahit bagian yang rusak
2. Hama gudang. Hama ini biasanya terdapat pada lipatan karung beras yang ada di gudang. Hal ini terjadi karena kurang terjaganya kebersihan gudang. Untuk mengatasi hal ini biasanya pihak pengelola gudang melakukan spraying dan fumigasi. Kegiatan ini dilakukan secara insidental oleh pihak gudang.

Tabel 9. Pemasukan, Pengeluaran, dan Persediaan Beras yang Disimpan di Gudang Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat Tahun 2010 (ton).

No.	Bulan	Persediaan Awal	Jumlah Pemasukan	Persediaan yang dikuasai	Jumlah Pengeluaran	Persediaan Akhir
1	Januari	17,084.85	7,500.00	24,584.85	1,002.47	23,582.38
2	Februari	23,582.38	2,466.82	26,049.20	9,968.86	16,080.34
3	Maret	16,080.34	8,724.78	24,805.12	7,523.92	17,281.20
4	April	17,281.20	3,025.18	20,306.38	6,360.90	13,945.48
5	Mei	13,945.48	7,258.67	21,204.15	7,994.05	13,210.10
6	Juni	13,210.10	4,287.41	17,497.51	8,276.70	9,220.81
7	Juli	9,220.81	1,339.84	10,560.65	4,351.20	6,209.45
8	Agustus	6,209.45	7,268.25	13,477.70	9,680.14	3,797.56
9	September	3,797.56	7,531.99	11,329.55	6,638.39	4,691.16
10	Oktober	4,691.16	9,630.89	14,322.05	8,348.54	5,973.51
11	November	5,973.51	9,738.81	15,712.32	6,417.25	9,295.07
12	Desember	9,295.07	10,486.38	19,781.45	9,452.60	10,328.85

Sumber: Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat, 2011

Tabel 8 dan 9 memperlihatkan jumlah persediaan di awal bulan, pemasukan, pengeluaran selama satu bulan dan persediaan yang tercatat di akhir bulan selama tahun 2009 dan 2010. Untuk pengeluaran beras oleh Perum Bulog Divre Sumbar yang biasa disebut penyaluran dilakukan setiap bulan dengan jumlah yang tidak tentu. Penyaluran beras oleh Perum Bulog Divre Sumbar adalah banyaknya beras yang disalurkan oleh Perum Bulog Divre Sumbar dari seluruh wilayah kerja yang diberikan kepada golongan-golongan tertentu.

Biasanya penyaluran beras yang dilakukan oleh Perum Bulog Divre Sumbar berdasarkan permintaan beberapa instansi pemerintah dan perintah dari Perum Bulog Pusat yang biasa disebut Prinlog (Perintah Logistik), dan penyaluran ke luar antar gudang (move out).

Pengeluaran untuk tahun 2009 dan 2010 pada dasarnya sama hanya saja dibedakan berdasarkan golongan penyaluran. Pada tahun 2009 penyaluran yang dilakukan Perum Bulog Divre Sumbar dibedakan atas:

1. Penyaluran kepada golongan anggaran. Penyaluran ini merupakan penyaluran kepada instansi pemerintahan dimana anggaran pembayarannya langsung dibayarkan oleh instansi tersebut. Yang termasuk golongan anggaran adalah TNI, Polri, Depkeh, Depsos, Deptrans.
2. Penyaluran diluar golongan anggaran. Penyaluran ini merupakan penyaluran kepada beberapa pihak atau instansi dimana untuk pembayarannya belum dianggarkan oleh instansi atau pihak yang bersangkutan. Penyaluran diluar golongan anggaran antara lain Raskin, Operasi Pasar Khusus (OPK), dan karyawan/pensiunan PNS yang pembayarannya oleh Pemda, bencana alam yang pembayarannya oleh Depsos.

Sedangkan tahun 2010 penyaluran dibedakan atas:

1. Penyaluran untuk golongan anggaran berdasarkan Prinlog merupakan penyaluran kepada golongan anggaran yang diperintahkan langsung oleh Perum Bulog Pusat. Penyaluran ini hanya diberikan kepada Depsos.
2. Penyaluran untuk golongan anggaran diluar Prinlog yakni penyaluran kepada golongan anggaran dimana perintah penyalurannya tidak diperintahkan oleh Perum Bulog Pusat. Penyaluran seperti ini disalurkan kepada Depkeh dan karyawan/pensiunan.

Untuk lebih rincinya pengeluaran beras yang dilakukan Perum Bulog Divre Sumbar pada tahun 2009 dan 2010 dapat dilihat pada Lampiran 10 dan 11. Pada Tabel 8 terlihat penyaluran yang dilakukan Perum Bulog Divre Sumbar cenderung berfluktuasi pengeluaran paling banyak terjadi pada bulan Maret, Juni, Oktober, dan November. Pada bulan Maret dan Juni dipengaruhi oleh permintaan jumlah beras Raskin yang meningkat, sedangkan pada Oktober dan November selain beras Raskin permintaan beras untuk bencana alam dari Depsos meningkat,

hal ini disebabkan adanya bencana gempa bumi yang menimpa Sumatera Barat di akhir September 2009.

Pada tahun 2010 pengeluaran beras masih berfluktuasi namun cenderung stabil. Hanya saja jika dibandingkan tahun 2009, ditahun ini jumlah penyaluran beras oleh Perum Bulog Divre Sumbar menurun. Hal ini dikarenakan beberapa yang dulunya termasuk golongan anggaran sudah tidak disalurkan lagi, selain itu adanya penurunan pagu raskin, dan jumlah beras CBP yang cenderung tidak banyak digunakan.

4.7 Perbandingan Biaya Pengadaan oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat

Perbandingan biaya pengadaan ini ditujukan untuk melihat berapa selisih biaya yang dikeluarkan oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat saat melakukan *move in* Nas dari Jawa Timur dibandingkan dengan jika melakukan pengadaan dari Sumatera Barat dengan harga riil yang berlaku.

Dalam melakukan *move in* dari Perum Bulog Divre Jatim biaya yang dikeluarkan Perum Bulog Divre Sumbar meliputi biaya transportasi laut, biaya transportasi darat dari pelabuhan Teluk Bayur sampai Gudang Perum Bulog Mata Air / Ampalu, dan biaya bongkar muat. Dari hasil penghitungan yang dilakukan (Lampiran 14 dan 15) diperoleh rincian biaya pengadaan *move in* pada Tabel 10 berikut:

Tabel 10. Rincian Biaya Pengadaan *Move In* dari Divre Jawa Timur Tahun 2009 dan 2010

No.	Biaya	2009 (Rp/kg)	2010 (Rp/kg)
1	Harga Pembelian Pemerintah (HPP)	4.600	5.060
2	B. Transportasi Laut (Kapal)	392,73	416,25
3	B. Transportasi Darat	20	22
4	B. Bongkar Muat	10	10
	Total	5.022,75	5.508,25

Sumber: Perum Bulog Divisi Regional Sumbar (Data Diolah), 2010

Dari perhitungan rincian biaya pada Tabel 10, diperoleh total biaya pengadaan *move in* dari Perum Bulog Divre Jatim sebanyak Rp 5.022,75 per kg. Pada Tabel 11 dapat dilihat harga beras kualitas medium dari wilayah Pesisir Selatan untuk beberapa bulan berada di bawah biaya pengadaan *move in*. Selama bulan April hingga Oktober harga beras kualitas medium di Sumatera Barat memang berada di atas Harga Pembelian pada saat itu. Dengan harga riil yang berada dibawah biaya pengadaan *move in*, seharusnya Perum Bulog Divre Sumbar bisa menyerap Pengadaan Dalam Negeri Sumbar walaupun tidak dengan tarif Harga Pembelian Pemerintah. Tapi pada kenyataannya dalam rentang waktu tersebut justru pengadaan *move in* lebih banyak. Bahkan pada bulan April Perum Bulog Divre Sumbar sama sekali tidak melakukan ADA DN Sumbar.

Tabel 11. Perbandingan Biaya Pengadaan Tahun 2009

No.	Bulan	Biaya Move In Jatim (Rp/kg)	Biaya Pengadaan Sumbar (Rp/kg)
1	Januari	5,022.75	5,537.50
2	Februari	5,022.75	5,750.00
3	Maret	5,022.75	5,500.00
4	April	5,022.75	4,987.50
5	Mei	5,022.75	4,750.00
6	Juni	5,022.75	4,775.00
7	Juli	5,022.75	4,750.00
8	Agustus	5,022.75	4,850.00
9	September	5,022.75	4,800.00
10	Oktober	5,022.75	4,625.00
11	November	5,022.75	5,075.00
12	Desember	5,022.75	5,131.25
	Rata-rata	5.022,75	5,019.27

Dari Tabel 12 dapat dilihat, pada tahun 2010 harga riil rata-rata beras kualitas medium di Sumatera Barat memang cenderung selalu berada diatas biaya pengadaan *move in*, sehingga pada saat itu realisasi ADA DN Sumbar turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Hanya pada bulan Januari saja harga rata-rata beras kualitas medium di Sumatera Barat berada dibawah biaya pengadaan

move in. Namun sangat disayangkan pada bulan tersebut Perum Bulog Divre Sumbar tidak melakukan pengadaan dalam negeri Sumbar. Satu-satunya pemasukan stok beras pada saat itu hanya melalui *move in* saja.

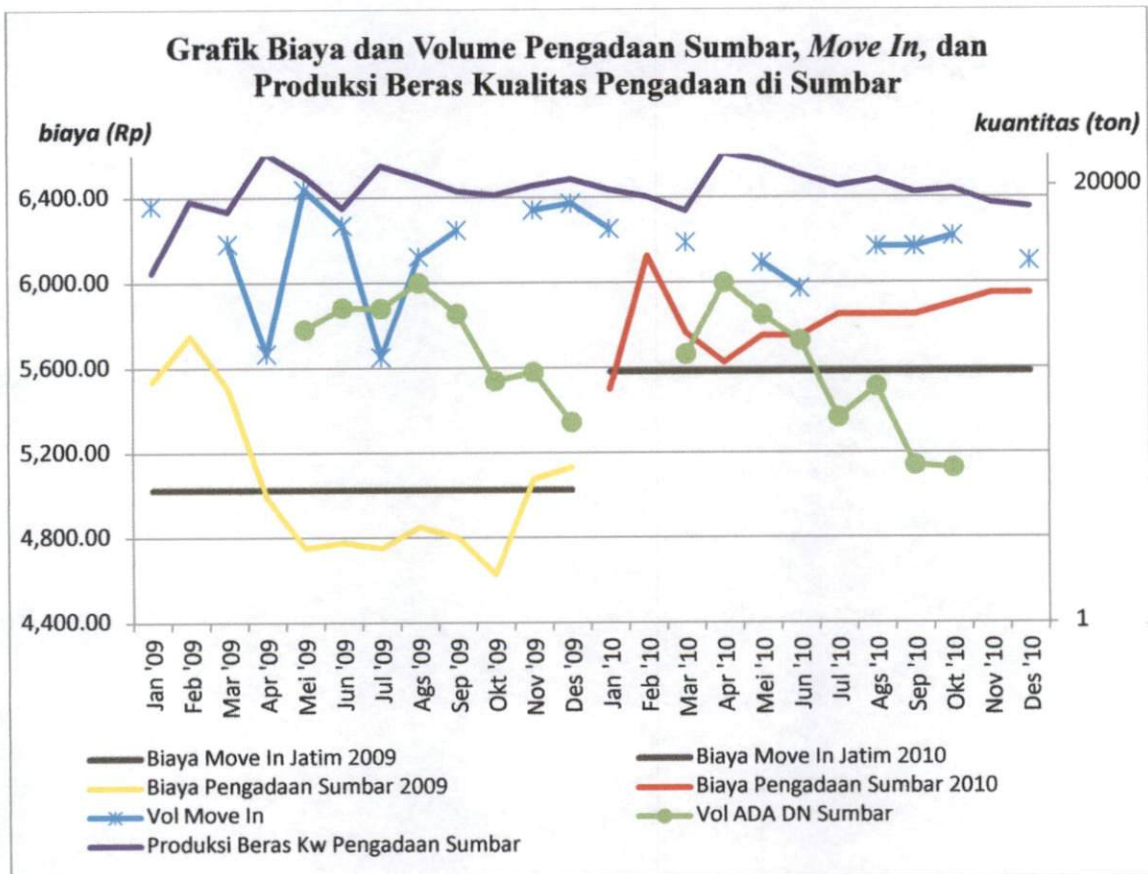
Tabel 12. Perbandingan Biaya Pengadaan Tahun 2010

No.	Bulan	Biaya Move In Jatim (Rp/kg)	Biaya Pengadaan Sumbar (Rp/kg)
1	Januari	5,508.25	5,500.00
2	Februari	5,508.25	6,125.00
3	Maret	5,508.25	5,762.50
4	April	5,508.25	5,625.00
5	Mei	5,508.25	5,750.00
6	Juni	5,508.25	5,750.00
7	Juli	5,508.25	5,850.00
8	Agustus	5,508.25	5,850.00
9	September	5,508.25	5,850.00
10	Oktober	5,508.25	5,900.00
11	November	5,508.25	5,950.00
12	Desember	5,508.25	5,950.00
Rata-rata		5.508,25	5,821.88

Untuk lebih jelasnya perbandingan biaya pengadaan dari kedua daerah ini, disajikan lewat grafik pada Gambar 2. Pada grafik di Gambar 2 akan diperlihatkan jumlah volume pengadaan, *move in* dari Divre Jatim, dan produksi beras pengadaan di Sumatera Barat.

Dari grafik tersebut dapat dilihat jumlah ADA DN Sumbar yang diserap oleh Perum Bulog Divre Sumbar lebih banyak dipengaruhi oleh harga dibandingkan jumlah produksi. Jika dilihat dari bulan Mei-September 2009 produksi beras untuk kualitas pengadaan cenderung stabil, namun dikarenakan harga pasar yang tidak terlalu tinggi, maka ADA DN Sumbar dapat terserap lebih banyak namun tidak optimal, dikarenakan pada periode tersebut Perum Bulog Divre Sumbar masih banyak melakukan *move in* dari Perum Bulog Divre Jatim. Bahkan pada bulan April 2009 ADA DN Sumbar sama sekali tidak dilakukan meskipun harga pasar pada saat itu lebih murah jika dibandingkan dengan melakukan *move in*.

Hal tersebut dikarenakan Perum Bulog Divre Sumbar hanya berpedoman kepada Harga Pembelian Pemerintah pada saat melakukan pengadaan dan tidak memperhitungkan biaya diluar itu. Jika dibandingkan dengan Harga Pembelian Pemerintah saja memang pada saat itu harga riil beras di Sumatera Barat selalu berada diatas HPP. Namun jika dibandingkan dengan biaya tambahan yang dikeluarkan maka harga riil beras di Sumatera Barat lebih murah. Hal inilah yang luput dari perhitungan Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dalam mangambil keputusan pengadaan. Akan lebih baik jika biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan tersebut ditambahkan sebagai insentif untuk melakukan ADA DN Sumbar secara maksimal.



Gambar 2. Grafik Gabungan Perbandingan Biaya Pengadaan Sumbar dan *Move In*, Volume ADA DN dan *Move In*, dan Produksi Beras Kualitas Pengadaan di Sumatera Barat.

Pada tahun 2010 terlihat meskipun harga rata-rata cenderung diatas HPP, namun ADA DN Sumbar masih tetap bisa dilakukan, bahkan pada bulan Mei jumlah ADA DN tergolong banyak. Hal ini dikarenakan sebelumnya pihak Mitra

Kerja telah membeli gabah dari produsen sebanyak-banyaknya pada saat harga turun. Pada bulan Februari 2010 pada saat harga pasar tinggi, baik ADA DN maupun *move in* tidak dilakukan oleh Perum Bulog Divre Sumbar.

Jika dilihat dari segi pembiayaan, Perum Bulog Divre Sumbar dapat dikatakan rugi ketika tetap melakukan *move in* dari Perum Bulog Divre Jatim pada saat harga pasar di Sumbar sendiri jauh lebih murah. Namun melihat fungsinya sebagai perusahaan umum dan bukan perusahaan swasta hal ini tidak menjadi masalah. Jika dilihat kembali tujuan ADA DN sendiri yakni untuk memberikan jaminan harga, pembiayaan, dan pasar kepada produsen dengan pemberian insentif HPP lewat kegiatan ADA DN, maka disini dapat dikatakan Perum Bulog Divre Sumbar belum mampu menjalankan tugas pokok pengamanan HPP tersebut dengan optimal.

Hal lain yang bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi Perum Bulog Divre Sumbar untuk tetap melakukan pengadaan dari Sumbar saja adalah faktor perbedaan jenis beras antara kedua daerah. Walaupun pada prinsipnya persyaratan untuk kualitas beras pengadaan telah diatur didalam Inpres yang berlaku, namun pada kenyataannya beras yang diproduksi di masing-masing daerah tetap memiliki perbedaan. Beras pengadaan yang berasal dari Jawa khususnya Jawa Timur memiliki tekstur pulen, lengket dan cenderung basah. Selain mungkin dikarenakan oleh faktor tanah atau penyimpanan yang terlalu lama beras ini berwarna sedikit kusam dan kekuningan. Selain itu, jika Perum Bulog dapat melakukan pengadaan semaksimal mungkin dari Sumbar maka konsumen akan memperoleh beras yang tergolong baru disetiap periode penyaluran dibandingkan dengan beras dari Jatim yang rentan terserang hama dan jamur akibat penyimpanan yang terlalu lama sehingga mempengaruhi bentuk, bau, dan rasa saat telah dimasak.

Dari pihak produsen, pengadaan dari Sumbar akan memberikan kepastian pasar dan harga kepada produsen beras di Sumbar. Walaupun harga yang ditawarkan pihak Perum Bulog tidak terlalu tinggi dibandingkan pasar setidaknya produsen akan memperoleh kepastian pembayaran karena Bulog akan langsung membayar secara lunas saat serah terima barang.

Upaya yang dapat dilakukan Perum Bulog Divre Sumbar tidak hanya melakukan pengadaan dalam bentuk beras saja. Pengadaan dalam bentuk gabah

untuk kemudian diolah langsung oleh Perum Bulog Divre Sumbar dapat menjadi pilihan tepat agar ADA DN dapat terserap optimal. Namun hal ini tidak dapat dilakukan Perum Bulog Divre Sumbar karena Unit Pengolahan Gabah Beras (UPGB) yang mereka miliki tidak lagi beroperasi. Dapat dilihat disini bahwa Perum Bulog Divre Sumbar belum mampu menyentuh produsen secara langsung dalam melakukan ADA DN di wilayah kerjanya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dapat disimpulkan:

1. Pengadaan merupakan salah satu fungsi operasional yang dilakukan oleh Perum Bulog terkait perannya sebagai pelaksana tugas publik. Kegiatan pengadaan yang dilakukan lebih cenderung dijadikan sebagai stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang digunakan untuk keperluan darurat, bencana alam, stabilisasi harga di pasar konsumen, dan penyaluran beras bersubsidi bagi keluarga miskin.

Mekanisme pengadaan beras oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat selalu disesuaikan dengan pedoman umum pada tahun anggaran yang bersangkutan. Sepanjang tahun 2009 dan 2010 Pengadaan Dalam Negeri Sumbar tidak terserap maksimal bahkan jauh berada dibawah prognosa awal tahun. Padahal produksi tanaman padi di Sumatera Barat dapat dikatakan surplus. Pengadaan beras lebih banyak dilakukan dengan *move in* (antar Divre) dari Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur.

2. Perbedaan biaya pengadaan *move in* dari Divre Jatim dengan harga riil beras kualitas medium di Sumbar tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2009 rata-rata biaya pengadaan di Sumbar dengan harga riil lebih murah dibandingkan melakukan pengadaan *move in* dari Divre Jatim, hal ini dikarenakan harga riil di Sumbar pada saat itu cenderung murah. Sedangkan pada tahun 2010, biaya melakukan pengadaan dari Sumbar dengan harga riil lebih mahal dibandingkan melakukan pengadaan *move in* dari Divre Jatim, ini disebabkan harga rata-rata beras di Sumbar pada saat itu mahal. Faktor harga pasar memang yang paling dominan dalam penyerapan pengadaan di Sumbar dibandingkan produksi beras itu sendiri. Karena jika dilihat dari ketersediannya, jumlah produksi beras untuk kualitas pengadaan di Sumbar sendiri dapat dikatakan cukup.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi hambatan yang dialami Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat terkait pengadaan beras, antara lain:

1. Untuk dapat menyerap pengadaan dalam negeri Sumbar secara maksimal, Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dapat melakukan sistem insentif. Biaya angkutan yang dikeluarkan pada saat melakukan *move in* dapat ditambahkan sebagai insentif dalam melakukan pembelian beras dalam negeri Sumbar. Sehingga harga yang ditawarkan dalam membeli beras sedikit diatas Harga Pembelian Pemerintah yang berlaku.
2. Aktifkan kembali fungsi UPGB dan optimalkan peran SATMIN. UPGB (Unit Pengelolaan Gabah Beras) merupakan unit usaha intern Perum Bulog yang mendukung kegiatan pelayanan publik dan pengembangan usaha Perum Bulog. Sedangkan SATMIN (Satuan Tugas Administrasi) adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Kadivire/Kasubdivire untuk melakukan penyelesaian administrasi dan pembayaran harga gabah/beras serta biaya pengadaan dalam negeri. Sebelumnya UPGB di wilayah kerja Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat pernah ada namun tidak bertahan lama (uji coba), ada baiknya UPGB ini kembali diaktifkan dijadikan sebagai mata rantai utama dalam kegiatan ADA DN Sumbar. Karena dengan adanya UPGB, Perum Bulog Divre Sumbar dapat langsung berhubungan dengan petani produsen, sehingga tidak hanya pengadaan beras saja namun pengadaan gabah pun dapat terserap optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amang, Beddu. 1995. *Kebijaksanaan Pangan Nasional*. Dharma Karsa Utama. Jakarta.
- Arif, Hendra. 2008. Konsep Ketahanan Pangan. www.ajangberkarya.wordpress.com [28 Januari 2011].
- Arifin, Bustanul. 1994. *Pangan dalam Orde Baru*. Jakarta.
- Asnawi, S. 1998. *Peranan dan Masalah Irigasi dalam Mencapai dan Melestarikan Swasembada Beras*. Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar tetap Ekonomi Pertanian. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Statistik Harga Produk Gabah di Indonesia 2009*. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Sumatera Barat Dalam Angka 2010*. BPS. Jakarta
- Bulog. 2009. *Pedoman Umum Dan Strandar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Perum Bulog Tahun 2009*. Perum Bulog. Jakarta.
- Bulog. 2010. *Pedoman Umum Dan Strandar Operasional Prosedur Kemitraan ADA DN Perum Bulog Tahun 2010*. Perum Bulog. Jakarta.
- Bulog. 2010. *Pedoman Umum Dan Strandar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Perum Bulog Tahun 2010*. Perum Bulog. Jakarta.
- Bulog. 2010. *Statistik Operasional Dan Pendukung Operasional Tahun 2010*. Perum Bulog. Jakarta.
- Bulog. 2010. *Statistik Harga Tahun 2010*. Perum Bulog. Jakarta.
- Hanani, Nuhfil. 2009. *Ketahanan Pangan: Sub Sistem Ketersediaan*, Makalah Workshop I Ketahanan Pangan di Wilayah Jawa Timur. Surabaya.
- Hariato. 2007. *Peranan Pertanian dalam Ekonomi Pedesaan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Heizer, Jay dan Barry Render. 2006. *Manajemen Operasi*, Edisi Ketujuh. Salemba Empat. Jakarta.
- Irawan. 2005. *Analisis Ketersediaan Beras Nasional: Suatu Kajian Simulasi Pendekatan Sistem Dinamis*. Prosiding Multifungsial Pertanian.
- Khomsan, Ali . 2003. *Pangan dan Gizi untuk Kesehatan*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

- Kurdianto, Rizal. 2005. *Analisa Persediaan Gabah Pada Unit Penggilingan Gabah-Beras Soekarno-Hatta Perum Bulog Divisi Regional Lampung* [skripsi]. Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. Lampung.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalian Indonesia. Jakarta.
- Perum Bulog. 2010. *Sekilas Pengadaan*. www.bulog.go.id. [5 Februari 2011].
- Saifullah, Agus. 2001. *Peran Bulog Dalam Kebijakan Perberasan Nasional*. Jakarta
- Saifullah, Agus dan Epi Sulandari. 2008. *Lembaga Pengelola Stok Beras Di Indonesia*. Jakarta.
- Saifullah, Agus dan Agus Dwi Indiarto. 2008. *Perum Bulog Sebagai Lembaga Pangan*. Jakarta.
- Sawit, M Husein, Bambang Djanuardi, dan Kiki Partini. 2003. *Perkembangan Propek Kemandirian Pangan Nasional. Analisis Kebijakan Pertanian Vol.1 No.2*, Juni 2003 Hal 123-142.
- Silsia, Mila. 2007. *Analisa Peranan Perum Bulog Suidivisi Regional Bukittinggi Dalam Mengendalikan Harga Gabah Dan Beras Pada Wilayah Kerjanya* [Skripsi]. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Padang.
- Simchi - Levi, David, Philip kaminsky and edith simchi levi, 2000, *Designed And Managing The Supply Chain Concept, Strategis And Case Study*, Irwin Mc Graww Hill, Singapore int. edition.
- [Warta Pertanian] Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2005. *Peluang Menuju Swasembada Beras Berkelanjutan. Volume 27*
- Yonekura, Hitoshi. 2005. *Institutional Reform in Indonesia's Food Security Sector: The Transformation of Bulog into a Public Corporation*. The Developing Economies, XLIII-1 (March 2005): 121-48

LAMPIRAN

Lampiran 1. Angkutan Beras Menurut Divre Pengirim dan Penerima Tahun 2009 dan 2010

No.	DIVRE	2009 (ton)		2010 (ton)	
		Pengirim	Penerima	Pengirim	Penerima
1	Aceh	0	46.154	0	54.950
2	Sumut	19.850	171.550	32.000	236.000
3	Riau	0	45.450	0	77.750
4	Sumbar	34.500	81.497	28.500	39.617
5	Jambi	0	28.000	0	28.500
6	Sumsel	0	7.500	12.500	0
7	Bengkulu	0	29.530	0	34.700
8	Lampung	3.200	57.608	2.380	49.360
Sumatera		57.550	470.292	73.000	520.877
9	DKI Jakarta	123.880	174.503	0	8.000
10	Jabar	0	103.700	0	91.900
11	Jateng	35.263	0	72.300	0
12	DIY	9.000	0	10.000	0
13	Jatim	546.101	0	570.115	0
Jawa		714.244	278.203	652.415	99.900
14	Kalbar	0	69.161	0	46.200
15	Kaltim	0	26.709	0	32.050
16	Kalsel	0	4.100	2.654	1.262
17	Kalteng	0	22.865	0	16.575
Kalimantan		0	122.835	2.654	96.087
18	Sulut	0	41.922	0	46.350
19	Sulteng	0	18.400	0	7.600
20	Sultra	0	14.850	0	43.810
21	Sulsel	413.865	0	360.860	0
Sulawesi		413.865	75.172	360.860	97.760
22	Bali	0	14.000	0	11.960
23	N.T.B	24.979	0	59.250	0
24	N.T.T	24.905	93.844	0	172.595
25	Maluku	0	47.576	0	55.200
26	Irja	0	133.621	0	205.100
27	Timtim	0	0	0	0
Indonesia Timur		49.884	289.041	59.250	444.855

Sumber: Perum Bulog, 2010

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Lampiran 2. Harga Rata-Rata Beras Kualitas Medium di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009 dan 2010

No.	Bulan	2009	2010
1	Januari	4.908,13	5.027,85
2	Februari	4.742,96	5.147,34
3	Maret	4.747,17	5.081,68
4	April	4.473,41	5.061,16
5	Mei	4.738,66	5.093,89
6	Juni	4.871,39	5.095,11
7	Juli	4.882,62	5.083,23
8	Agustus	4.864,74	5.105,20
9	September	4.873,54	5.170,84
10	Oktober	4.874,26	5.232,73
11	November	4.886,93	5.245,23
12	Desember	4.960,36	5.249,36
	Rata-rata	4.795,93	5.122,20

Sumber: Perum Bulog, 2010

Lampiran 3. Luas Panen, Produksi, dan Rata-Rata Produksi Padi di Sumatera Barat Tahun 2006-2010

Tahun	Luas Panen (Ha)	Rata-rata (kw/ha)	Produksi
2006	417.846	45,22	1.889.489
2007	423.655	45,75	1.938.120
2008	421.902	46,59	1.965.634
2009	439.543	47,91	2.105.790
2010	451.860	48,52	2.192.288

Sumber: BPS, 2010

Lampiran 4. RKAP dan Realisasi Pengadaan DN Dari Wilayah Sumatera Barat Tahun 2009 dan 2010.

Tahun	Uraian	RKAP (ton)	Realisasi (ton)	%
2009	Gabah	-	-	-
	Eq. Beras	-	-	-
	Beras	10.000	7.149	71,49
	Jumlah setara beras	10.000	7.149	71,49
2010	Beras	10.000	4.698	46,98
	Jumlah	10.000	4.698	46,98

Sumber: Perum Bulog Divre Sumbar, 2010

Lampiran 5. Inpres RI No.8 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Perberasan



**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
KEBIJAKAN PERBERASAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan petani, peningkatan ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi pedesaan dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan perberasan nasional;
- b. bahwa sebagai akibat dari perkembangan nasional dan global di bidang pangan, khususnya perberasan, dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan perberasan tahun 2008;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan;
- Mengingat** : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada** : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Dalam Negeri;

Lanjutan Lampiran 5



- 2 -

4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Pekerjaan Umum;
9. Menteri Sosial;
10. Menteri Kehutanan;
11. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
12. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
14. Kepala Badan Pusat Statistik;
15. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
16. Para Gubernur;
17. Para Bupati dan Walikota.

Untuk, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing:

- PERTAMA** : Mendorong dan memfasilitasi penggunaan benih padi unggul-bersertifikat.
- KEDUA** : Mendorong dan memfasilitasi penggunaan pupuk anorganik dan organik secara berimbang dalam usaha tani padi.

Lanjutan Lampiran 5



- 3 -

- KETIGA** : Mendorong dan memfasilitasi pengurangan kehilangan pasca-panen padi.
- KEEMPAT** : Mengendalikan pengurangan luas lahan irigasi teknis.
- KELIMA** : Memfasilitasi rehabilitasi lahan dan penghijauan daerah tangkapan air serta rehabilitasi jaringan irigasi.
- KEENAM** : Mendorong dan memfasilitasi peningkatan investasi dibidang usaha padi.
- KETUJUH** : Melaksanakan kebijakan pembelian Gabah/Beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah sebagai berikut:
1. Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% adalah Rp 2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) per kilogram di petani, atau Rp 2.440,00 (dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) per kilogram di penggilingan;
 2. Harga Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% adalah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilogram di penggilingan, atau Rp 3.040,00 (tiga ribu empat puluh rupiah) per kilogram di gudang Bulog;

Lanjutan Lampiran 5



- 4 -

3. Harga Pembelian Beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14%, butir patah maksimum 20%, kadar menir maksimum 2% dan derajat sosoh minimum 95% adalah Rp 4.600,00 (empat ribu enam ratus rupiah) per kilogram di gudang Bulog;
4. Harga Pembelian Gabah dan Beras diluar kualitas sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian.

KEDELAPAN : 1. Pelaksanaan Pembelian Gabah/Beras oleh Pemerintah secara nasional dilakukan oleh Perum Bulog;

2. Pembelian Gabah/Beras oleh Pemerintah di daerah, selain dilakukan oleh Perum Bulog, juga dapat dilakukan oleh Badan Pemerintah atau Badan Usaha dibidang pangan.

KESEMBILAN : 1. Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah;

2. Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan;

Lanjutan Lampiran 5



- 5 -

3. Penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta penyediaan dan penyaluran beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan dilaksanakan oleh Perum Bulog.

KESEFULUH : Menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga beras dalam negeri.

- KESEBELAS** :
1. Penyediaan beras bagi kepentingan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan pengadaan Cadangan Beras Pemerintah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan beras yang berasal dari pembelian Gabah petani dalam negeri sebagaimana diatur dalam Diktum KETUJUH Instruksi Presiden ini;
 2. Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah dilakukan oleh Perum Bulog;
 3. Pengadaan dan pengelolaan cadangan beras oleh Pemerintah di daerah, selain untuk Cadangan Beras Pemerintah yang dilakukan oleh Perum Bulog, dapat dilakukan oleh Badan Pemerintah atau Badan Usaha dibidang pangan.

Lanjutan Lampiran 5



- 6 -

- KEDUA BELAS** : 1. Menetapkan kebijakan ekspor dan impor beras secara terkendali dalam rangka menjaga kepentingan petani dan konsumen;
2. Impor beras sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi Cadangan Beras Pemerintah, dan/atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri;
3. Ekspor beras sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri telah tercukupi dan tidak mengganggu stabilitas harga dalam negeri.
- KETIGA BELAS** : Menetapkan kebijakan pendukung yang diperlukan bagi efektifnya pelaksanaan kebijakan perberasan ini.
- KEEMPAT BELAS** : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan perberasan ini.
- KELIMA BELAS** : Semua ketentuan tentang penetapan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh Pemerintah yang telah ada sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Lampiran 6. Inpres RI No.7 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Perberasan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
KEBIJAKAN PERBERASAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan petani, peningkatan ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi pedesaan dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan perberasan nasional;
- b. bahwa sebagai akibat dari perkembangan nasional dan global di bidang pangan, khususnya perberasan, dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan perberasan tahun 2009;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Dalam Negeri;

Lanjutan Lampiran 6

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Pekerjaan Umum;
9. Menteri Sosial;
10. Menteri Kelutanan;
11. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
12. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
14. Kepala Badan Pusat Statistik;
15. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
16. Para Gubernur;
17. Para Bupati dan Walikota.

Untuk, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing:

- PERTAMA** : Mendorong dan memfasilitasi penggunaan benih padi unggul-bersertifikat.
- KEDUA** : Mendorong dan memfasilitasi penggunaan pupuk anorganik dan organik secara berimbang dalam usaha tani padi.

Lanjutan Lampiran 6

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Mendorong dan memfasilitasi pengurangan kehilangan pasca-panen padi.
- KEEMPAT : Mengendalikan pengurangan luas lahan irigasi teknis.
- KELIMA : Memfasilitasi rehabilitasi lahan dan penghijauan daerah tangkapan air serta rehabilitasi jaringan irigasi.
- KEENAM : Mendorong dan memfasilitasi peningkatan investasi dibidang usaha padi.
- KETUJUH : Melaksanakan kebijakan pembelian Gabah/Beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah sebagai berikut:
1. Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% dan kadar hampa/ kotoran maksimum 10% adalah Rp 2.640,00 (dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) per kilogram di petani, atau Rp 2.685,00 (dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) per kilogram di penggilingan;
 2. Harga Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% dan kadar hampa/ kotoran maksimum 3% adalah Rp 3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di penggilingan, atau Rp 3.345,00 (tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) per kilogram di gudang Bulog;

Lanjutan Lampiran 6

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Harga Pembelian Beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14%, butir patah maksimum 20%, kadar menir maksimum 2% dan derajat sosoh minimum 95% adalah Rp 5.060,00 (lima ribu enam puluh rupiah) per kilogram di gudang Bulog;
4. Harga Pembelian Gabah dan Beras diluar kualitas sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian.

- KEDELAPAN :
1. Pelaksanaan Pembelian Gabah/Beras oleh Pemerintah secara nasional dilakukan oleh Perum Bulog;
 2. Pembelian Gabah/Beras oleh Pemerintah di daerah, selain dilakukan oleh Perum Bulog, juga dapat dilakukan oleh Badan Pemerintah atau Badan Usaha dibidang pangan.

- KESEMBILAN :
1. Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah;
 2. Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan;
 3. Penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta penyediaan dan

Lanjutan Lampiran 6



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

penyaluran beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan dilaksanakan oleh Perum Bulog.

KESEPULUH : Menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga beras dalam negeri.

KESEBELAS : 1. Penyediaan beras bagi kepentingan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan pengadaan Cadangan Beras Pemerintah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan beras yang berasal dari pembelian Gabah petani dalam negeri sebagaimana diatur dalam Diktum KETUJUH Instruksi Presiden ini;

2. Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah dilakukan oleh Perum Bulog;

3. Pengadaan dan pengelolaan cadangan beras oleh Pemerintah di daerah, selain untuk Cadangan Beras Pemerintah yang dilakukan oleh Perum Bulog, dapat dilakukan oleh Badan Pemerintah atau Badan Usaha dibidang pangan.

Lanjutan Lampiran 6



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- KEDUA BELAS :**
1. Menetapkan kebijakan ekspor dan impor beras secara terkendali dalam rangka menjaga kepentingan petani dan konsumen;
 2. Impor beras sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi Cadangan Beras Pemerintah, dan/atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri;
 3. Ekspor beras sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri telah tercukupi dan tidak mengganggu stabilitas harga dalam negeri.
- KETIGA BELAS :** Menetapkan kebijakan pendukung yang diperlukan bagi efektifnya pelaksanaan kebijakan perberasan ini.
- KEEMPAT BELAS:** Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan perberasan ini.
- KELIMA BELAS :** Semua ketentuan tentang penetapan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh Pemerintah yang telah ada sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.
- Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Lanjutan Lampiran 6



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Sekretaris Kabinet,

ttd

Lambock V. Nahattands

Lampiran 7. Laporan Harga Perkembangan Rata-Rata Beras Tingkat Penggilingan Tahun 2009

No	Kabupaten	Bulan												Rata-rata pertahun
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Solok	6,908.34	7,200.00	6,558.33	6,333.33	6,300.00	5,933.33	5,933.33	5,933.33	5,933.33	6,233.33	6,533.33	6,766.67	6,380.55
2	Tnh. Datar	5,587.50	6,175.00	6,137.50	5,950.00	5,633.33	5,633.33	5,633.33	5,633.33	5,633.33	6,066.67	6,500.00	6,625.00	5,934.03
3	Swl. Sijunjung	5,079.17	5,658.33	5,650.00	5,750.00	5,500.00	5,091.67	4,833.33	4,783.33	4,783.33	4,833.33	4,833.33	5,225.00	5,172.57
4	50 Kota	6,050.00	6,275.00	6,525.00	6,275.00	6,275.00	6,162.50	6,218.75	6,275.00	6,306.25	6,275.00	6,275.00	5,275.00	6,265.63
5	Pasaman	4,962.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	4,906.25	4,825.00	4,825.00	4,825.00	5,075.00	5,325.00	5,325.00	5,055.73
6	Agam	5,975.00	6,450.00	6,550.00	6,637.50	6,900.00	6,562.50	5,850.00	5,887.50	6,000.00	5,950.00	6,400.00	6,400.00	6,296.88
7	P.Pariaman	5,812.50	5,800.00	5,700.00	5,550.00	5,400.00	5,150.00	5,125.00	5,100.00	5,050.00	5,250.00	5,400.00	5,475.00	5,401.04
8	Pes.Selatan	5,537.50	5,750.00	5,500.00	4,987.50	4,750.00	4,775.00	4,750.00	4,850.00	4,800.00	4,625.00	5,075.00	5,131.25	5,069.27
9	Padang	6,012.50	6,000.00	5,800.00	5,600.00	5,475.00	5,387.50	5,350.00	5,350.00	5,250.00	5,400.00	5,500.00	5,556.25	5,556.77

Sumber: Perum Bulog Divre Sumbar, 2010

Lampiran 8. Laporan Harga Perkembangan Rata-Rata Beras Tingkat Penggilingan Tahun 2010

No	Kabupaten	Bulan												Rata-rata pertahun
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Solok	6,800.00	7,125.00	6,883.33	6,533.33	6,533.33	6,666.67	6,833.34	7,200.00	7,200.00	7,566.67	7,566.67	7,512.50	7,035.07
2	Tnh. Datar	6,737.50	6,837.50	6,500.00	6,111.67	6,056.67	6,150.00	6,458.33	6,933.33	6,933.33	7,266.67	7,266.67	7,325.00	6,718.89
3	Swl. Sijunjung	5,400.00	5,800.00	5,616.67	5,241.67	5,241.67	5,400.00	5,975.00	6,766.67	6,766.67	7,000.00	7,000.00	7,075.00	6,106.94
4	SO Kota	6,428.13	6,887.50	6,887.50	6,724.92	6,562.50	5,350.00	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50	7,093.75	6,562.23
5	Pasaman	5,968.75	7,250.00	6,793.75	5,843.75	6,350.00	7,000.00	5,350.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	7,137.50	6,180.73
6	Agam	6,600.00	6,925.00	6,950.00	7,000.00	7,000.00	6,100.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,062.50	6,969.79
7	P.Pariaman	5,750.00	6,875.00	6,512.50	6,150.00	6,100.00	5,750.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,250.00	6,350.00	6,350.00	6,223.96
8	Pes.Selatan	5,500.00	6,125.00	5,762.50	5,625.00	5,750.00	5,750.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,900.00	5,950.00	5,950.00	5,826.04
9	Padang	6,162.50	7,237.50	6,750.00	6,312.50	6,250.00	6,250.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,446.88

Sumber: Perum Bulog Divre Sumbar, 2011

Lampiran 9. Penerimaan Beras Move In Nas Divre Sumbar Tahun 2009 dan 2010

Divre Pengirim	Jenis Beras	Kuantum (Ton)
Tahun 2009		
1. Divre Jatim	ADA DN Jatim	81.497
Tahun 2010		
1. Divre Jatim	ADA DN Jatim	39.617
Jumlah		121.114

Sumber: Perum Bulog Divre Sumbar, 2010

Lampiran 10. Laporan Penerimaan, Pendistribusian, dan Persediaan Beras oleh Perum Bulog Divre Sumbar Tahun 2010

hal : 1

	Uraian	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		TOTAL (Jan - Juni)	
		GBH	BRS	GBH	BRS	GBH	BRS	GBH	BRS	GBH	BRS	GBH	BRS	GBH	BRS
1.	Persediaan Awal	-	17,084,849.000	-	23,682,384.000	-	18,080,345.000	-	17,281,200.000	-	13,945,480.000	-	13,210,105.000	-	17,084,849.000
2	Pemasukan :														
	1. Pengadaan Dalam Negeri 2010	-	-	-	-	-	440,130.000	-	2,209,785.000	-	1,068,510.000	-	597,120.000	-	4,315,545.000
	2. Hasil Giling Gabah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,000.000
	3. Hasil Reproses	-	-	-	216,870.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216,870.000
	4. Move Lokal In	-	-	-	750,000.000	-	-	-	-	-	1,500.000	-	-	-	750,000.000
	5. Move Regional In	-	-	-	1,499,950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,499,950.000
	6. Move Nasional In	-	7,500,000.000	-	-	-	2,784,850.000	-	815,400.000	-	2,722,225.000	-	1,742,295.000	-	9,564,520.000
	7. Pengadaan Luar Negeri	-	-	-	-	-	5,500,000.000	-	-	-	3,466,440.000	-	1,947,995.000	-	18,414,435.000
	8. Pengembalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. Pembatalan DO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pemasukan (2)	-	7,500,000.000	-	2,466,820.000	-	8,724,780.000	-	3,025,185.000	-	7,258,675.000	-	4,287,410.000	-	33,262,870.000
3	Persediaan Yang dikuasai (1+2)	-	24,584,849.000	-	26,049,204.000	-	24,805,125.000	-	20,306,385.000	-	21,204,155.000	-	17,497,515.000	-	50,347,719.000
4	Pengeluaran :														
	1. Penyaluran Untuk Golang berdasarkan Prinlog	-	-	-	-	-	4,000.000	-	-	-	5,000.000	-	-	-	9,000.000
	2. Penyaluran Untuk Golang diluar Prinlog	-	27,000.000	-	45,500.000	-	27,500.000	-	40,500.000	-	5,500.000	-	60,200.000	-	206,200.000
	3. Penyaluran Raskin	-	717,420.000	-	4,142,700.000	-	3,957,870.000	-	4,878,105.000	-	3,447,890.000	-	4,504,380.000	-	21,848,165.000
	4. Cadangan Beras Pemerintah	-	-	-	18,984.000	-	22,750.000	-	30,500.000	-	47,500.000	-	500.000	-	120,234.000
	5. Penyaluran Lain-lain	-	12,225.000	-	11,675.000	-	11,805.000	-	11,800.000	-	11,860.000	-	11,620.000	-	70,985.000
	6. Ekspor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Giling Gabah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. Reproses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. Move Lokal Out	-	-	-	750,000.000	-	-	-	-	-	1,500.000	-	-	-	1,500.000
	10. Move Regional Out	-	-	-	2,500,000.000	-	2,000,000.000	-	600,000.000	-	3,475,000.000	-	1,700,000.000	-	750,000.000
	11. Move Nasional Out	-	-	-	2,500,000.000	-	1,500,000.000	-	800,000.000	-	1,000,000.000	-	2,000,000.000	-	10,275,000.000
	12. Kehilangan / Kekurangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,800,000.000
	Jumlah Pengeluaran (4)	-	756,645.000	-	9,968,859.000	-	7,523,925.000	-	6,360,905.000	-	7,994,050.000	-	8,276,700.000	-	40,881,084.000
5	Susut Simpan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Turun Mutu	-	245,820.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Koreksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245,820.000
8	Pers.Akhir Ops. Di gudang (3-4)	-	23,582,384.000	-	16,080,345.000	-	17,281,200.000	-	13,945,480.000	-	13,210,105.000	-	9,220,815.000	-	9,220,815.000
9	Persediaan diluar Gudang														
	1. Dalam Proses Pengolahan	-	216,870.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Dalam Perjalanan Move Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Dalam perjalanan Move Regional	-	-	-	450,000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Sandar Move Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.000	-	500,000.000	-	-	500,000.000
	5. Sandar Move Regional	-	-	-	550,050.000	-	215,400.000	-	-	2,033,560.000	-	-	-	-	-
	6. Sandar Move Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	502,775.000	-	210,480.000	-	-	210,480.000
	7. Sisa Bongkar Beras Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Persediaan diluar Gudang	-	216,870.000	-	1,000,050.000	-	215,400.000	-	-	2,786,335.000	-	710,480.000	-	-	710,480.000
10	Persediaan Operasional Divre	-	23,799,254.000	-	17,080,395.000	-	17,496,600.000	-	13,945,480.000	-	15,996,440.000	-	9,931,295.000	-	9,931,295.000

Lanjutan Lampiran 10

Hal : 2

	Uraian	Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		TOTAL (Januari - Des)	
		GBH	BRS	GBH	BRS	GBH	BRS	GBH	BRS	GBH	BRS	GBH	BRS	GBH	BRS
1.	Persediaan Awal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pemasukan :	-	9,220,815.000	-	6,209,450.000	-	3,797,565.000	-	4,691,165.000	-	5,973,510.000	-	9,295,075.000	-	17,094,849.000
	1. Pengadaan Dalam Negeri 2010	-	104,355.000	-	210,000.000	-	-	-	33,180.000	-	-	-	-	-	4,698,330.000
	2. Hasil Giling Gabah	-	-	-	-	-	35,250.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Hasil Reproses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Move Lokal In	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,370.000
	5. Move Regional In	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,000.000
	6. Move Nasional In	-	1,235,480.000	-	2,058,255.000	-	2,486,745.000	-	2,585,370.000	-	1,309,455.000	-	3,810,510.000	-	22,850,335.000
	7. Pengadaan Luar Negeri	-	-	-	5,000,000.000	-	5,000,000.000	-	6,358,515.000	-	-	-	4,844,030.000	-	39,616,980.000
	8. Pengembalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,429,357.000	-	1,962,775.000	-	10,392,132.000
	9. Pembatalan DO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pemasukan (2)	-	1,339,835.000	-	7,268,255.000	-	10,000.000	-	653,820.000	-	-	-	69,080.000	-	732,880.000
3	Persediaan Yang dikuasai (1+2)	-	10,560,650.000	-	13,477,706.000	-	7,531,995.000	-	9,630,885.000	-	9,738,812.000	-	10,488,375.000	-	79,259,027.000
4	Pengeluaran :	-	10,560,650.000	-	13,477,706.000	-	11,329,560.000	-	14,322,050.000	-	15,712,322.000	-	19,781,450.000	-	98,343,876.000
	1. Penyaluran Untuk Golang berdasarkan Prinlog	-	-	-	5,500.000	-	-	-	11,300.000	-	8,000.000	-	150.000	-	31,950.000
	2. Penyaluran Untuk Golang diluar Prinlog	-	32,500.000	-	20,000.000	-	45,000.000	-	80,000.000	-	38,311.000	-	29,500.000	-	431,511.000
	3. Penyaluran Raskin	-	3,778,385.000	-	5,758,215.000	-	2,889,345.000	-	2,858,835.000	-	4,661,995.000	-	2,708,184.000	-	44,299,124.000
	4. Cadangan Beras Pemerintah	-	8,000.000	-	4,830.000	-	25,675.000	-	7,100.000	-	269,596.000	-	80,420.000	-	513,855.000
	5. Penyaluran Lain-lain	-	11,315.000	-	11,595.000	-	13,375.000	-	11,305.000	-	11,345.000	-	11,345.000	-	141,265.000
	6. Ekspor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Giling Gabah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. Reproses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. Move Lokal Out	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.000
	10. Move Regional Out	-	525,000.000	-	2,580,000.000	-	1,965,000.000	-	3,600,000.000	-	480,000.000	-	4,075,000.000	-	23,500,000.000
	11. Move Nasional Out	-	-	-	1,300,000.000	-	1,700,000.000	-	1,800,000.000	-	950,000.000	-	2,550,000.000	-	16,100,000.000
	12. Kehilangan / Kekurangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran (4)	-	4,351,200.000	-	9,680,140.000	-	6,638,395.000	-	8,348,540.000	-	6,417,247.000	-	9,452,589.000	-	85,769,205.000
5	Susut Simpan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Turun Mutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Koreksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245,820.000
8	Pers.Akhir Ops. Di gudang (3-4)	-	6,209,450.000	-	3,797,565.000	-	4,691,165.000	-	5,973,510.000	-	9,295,075.000	-	10,328,851.000	-	10,328,851.000
9	Persediaan diluar Gudang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Dalam Proses Pengolahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Dalam Perjalanan Move Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Dalam perjalanan Move Regional	-	-	-	300,000.000	-	-	-	150,000.000	-	185,175.000	-	649,665.000	-	649,665.000
	4. Sandar Move Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Sandar Move Regional	-	-	-	221,745.000	-	-	-	864,630.000	-	-	-	-	-	-
	6. Sandar Move Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Sisa Bongkar Beras Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,005,671.000	-	-	-	-
	Jumlah Persediaan diluar Gudang	-	-	-	521,745.000	-	-	-	1,014,630.000	-	2,190,846.000	-	849,665.000	-	649,665.000
10	Persediaan Operasional Divre	-	6,209,450.000	-	4,319,310.000	-	4,691,165.000	-	6,988,140.000	-	11,485,921.000	-	10,978,516.000	-	10,978,516.000

Lampiran 11. Laporan Penerimaan, Pendistribusian, dan Persediaan Beras oleh Perum Bulog Divre Sumbar Tahun 2009

Hal : 1

	Uraian	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		TOTAL (Jan - Juni)	
		GBH	BRS	GBH	BRS	GBH	BRS	GBH	BRS	GBH	BRS	GBH	BRS	GBH	BRS
1.	Persediaan Awal	-	10,895,577.000	-	22,333,605.000	-	16,734,958.000	-	13,333,823.000	-	8,289,304.000	-	22,090,621.000	-	10,895,577.000
2	Pemasukan :														
	1. Pengadaan Dalam Negeri 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773,820.000	-	1,268,520.000	-	2,042,340.000
	2. Angkutan antar Sub Divre.	-	-	-	777,297.000	-	3,451,135.000	-	3,620,448.000	-	2,928,297.000	-	3,358,421.000	-	14,135,598.000
	3. Import	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Move In Nasional	-	12,655,372.000	-	-	-	5,352,768.000	-	447,232.000	-	18,392,745.000	-	8,116,930.000	-	44,965,047.000
	5. Move In Lokal	-	-	-	191,685.000	-	887,304.000	-	1,041,011.000	-	-	-	-	-	2,100,000.000
	6. Hasil Olah Sweeping	-	13,455.000	-	15,304.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,759.000
	7. Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pemasukan (2)	-	12,668,827.000	-	984,286.000	-	9,671,207.000	-	5,108,691.000	-	22,094,862.000	-	12,743,871.000	-	63,271,744.000
3	Persediaan Yang dikusai (1+2)	-	23,564,404.000	-	23,317,891.000	-	26,406,165.000	-	18,442,514.000	-	30,384,166.000	-	34,834,492.000	-	74,167,321.000
4	Pengeluaran :														
	1. Penyaluran Golongan Anggaran														
	1.1 TNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.2 Polri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.3 Depkeh / BTW	-	74,000.000	-	30,000.000	-	9,500.000	-	73,000.000	-	54,500.000	-	20,500.000	-	261,500.000
	1.4 Deptrans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.5 B.K.S.N / Depsos	-	3,000.000	-	2,000.000	-	-	-	-	-	8,000.000	-	-	-	13,000.000
	1.6 PNS. Perum Bulog	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.7 Lain - lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Penyaluran di luar Gol. Anggaran														
	2.1 Raskin	-	125,670.000	-	4,415,423.000	-	5,361,877.000	-	4,685,835.000	-	3,859,410.000	-	6,940,965.000	-	25,389,180.000
	2.2 OPK CBP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3 BENCAL CBP	-	-	-	6,000.000	-	28,000.000	-	17,820.000	-	9,000.000	-	12,000.000	-	72,820.000
	2.4 Karyawan/ti & Pensiunan	-	12,320.000	-	11,515.000	-	11,465.000	-	11,555.000	-	11,635.000	-	11,585.000	-	70,075.000
	2.5 Bencal Permintaan Mensos	-	-	-	-	-	11,500.000	-	15,000.000	-	1,000.000	-	-	-	27,500.000
	3. Angkutan antar Sub Divre.	-	-	-	1,400,000.000	-	3,500,000.000	-	3,600,000.000	-	2,500,000.000	-	4,200,000.000	-	15,200,000.000
	4. Move Out Lokal	-	-	-	700,000.000	-	650,000.000	-	750,000.000	-	-	-	-	-	2,100,000.000
	5. Ke Divre lain / Move Nas	-	1,000,000.000	-	-	-	3,500,000.000	-	1,000,000.000	-	1,850,000.000	-	3,150,000.000	-	10,500,000.000
	6. Giling Gabah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Olah Sweeping	-	15,809.000	-	17,995.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,804.000
	8. PT. Asuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. Susut Move.Reg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10. Susut Move.Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11. Susut Olah Sweeping	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12. OSHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13. Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran (4)	-	1,230,799.000	-	6,582,933.000	-	13,072,342.000	-	10,153,210.000	-	8,293,545.000	-	14,335,050.000	-	53,667,879.000
5	Pers.Akhir Ops. Di gudang (3-4)	-	22,333,605.000	-	16,734,958.000	-	13,333,823.000	-	8,289,304.000	-	22,090,621.000	-	20,499,442.000	-	20,499,442.000
6	Dim Perjalan antar Sub Divre	-	-	-	1,131,018.000	-	962,579.000	-	651,120.000	-	222,823.000	-	1,064,402.000	-	1,064,402.000
7	Sandar Laut	-	-	-	-	-	447,232.000	-	-	-	1,031,015.000	-	414,085.000	-	414,085.000
8	Stock akhir operasional (5+6+7)	-	22,333,605.000	-	17,865,976.000	-	14,743,634.000	-	8,940,424.000	-	23,344,459.000	-	21,977,929.000	-	21,977,929.000

Lanjutan Lampiran 11

Hal : 2

	Uraian	Juli		Agustus		September		Oktober		Nopember		Desember		TOTAL (Jan - Desember 2009)	
		GBH	BRS	GBH	BRS	GBH	BRS	GBH	BRS	GBH	BRS	GBH	BRS	GBH	BRS
1.	Persediaan Awal	-	20,499,412.000	-	16,588,999.000	-	15,006,524.000	-	17,498,422.000	-	8,779,446.000	-	8,840,839.000	-	-
2	Pemasukan :														10,895,577.000
	1. Pengadaan Dalam Negeri 2009	-	1,246,425.000	-	2,126,475.000	-	1,106,085.000	-	240,000.000	-	293,730.000	-	94,275.000	-	7,149,330.000
	2. Angkutan antar Sub Divre.	-	3,323,427.000	-	738,275.000	-	1,981,098.000	-	3,578,202.000	-	3,560,025.000	-	6,435,375.000	-	33,750,000.000
	3. Import	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Move In Nasional	-	414,085.000	-	4,000,000.000	-	7,300,000.000	-	-	-	11,487,865.000	-	13,329,600.000	-	81,498,597.000
	5. Move In Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100,000.000
	6. Hasil Olah Sweeping	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,759.000
	7. Lain-lain / Depsos	-	-	-	-	-	-	-	47,715.000	-	-	-	-	-	47,715.000
	Jumlah Pemasukan (2)	-	4,983,937.000	-	6,864,750.000	-	10,387,183.000	-	3,863,917.000	-	15,341,620.000	-	19,859,250.000	-	124,572,401.000
3	Persediaan Yang dikuasai (1+2)	-	25,483,379.000	-	23,453,749.000	-	25,393,707.000	-	21,362,339.000	-	24,121,066.000	-	28,700,089.000	-	135,467,978.000
4	Pengeluaran :														
	1. Penyaluran Golongan Anggaran														
	1.1 TNI	-	-	-	-	-	-	-	1,243.000	-	-	-	-	-	1,243.000
	1.2 Polri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 Depkeh / BTW	-	44,000.000	-	33,000.000	-	43,500.000	-	6,000.000	-	45,480.000	-	-	-	433,480.000
	1.4 Deptrans	-	-	-	-	-	-	-	10,000.000	-	8,287.000	-	-	-	18,287.000
	1.5 B.K.S.N / Depsos	-	-	-	-	-	5,000.000	-	120,470.000	-	-	-	2,000.000	-	140,470.000
	1.6 PNS. Perum Bulog	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 Lain - lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2. Penyaluran di luar Gol. Anggaran														
	2.1 R a s k i n	-	3,632,865.000	-	4,793,760.000	-	4,431,420.000	-	4,265,925.000	-	6,091,725.000	-	4,188,625.000	-	52,793,500.000
	2.2 OPK CBP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 BENCAL CBP	-	6,000.000	-	9,000.000	-	1,600.000	-	877,400.000	-	20,000.000	-	85,000.000	-	1,071,820.000
	2.4 Karyawan/ti & Pensiunan	-	11,515.000	-	11,465.000	-	13,765.000	-	11,775.000	-	11,735.000	-	11,815.000	-	142,145.000
	2.5 Bencal Permintaan Mensos	-	-	-	-	-	-	-	4,817,480.000	-	-	-	500.000	-	4,845,480.000
	3. Angkutan antar Sub Divre.	-	2,700,000.000	-	1,100,000.000	-	2,400,000.000	-	2,450,000.000	-	6,600,000.000	-	3,300,000.000	-	33,750,000.000
	4. Move Out Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100,000.000
	5. Ke Divre lain / Move Nas	-	2,500,000.000	-	2,500,000.000	-	1,000,000.000	-	-	-	2,500,000.000	-	4,000,000.000	-	23,000,000.000
	6. Giling Gabah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7. Olah Sweeping	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8. PT. Aauransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,804.000
	9. Susut Move.Reg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10. Susut Move.Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11. Susut Olah Sweeping	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12. OSHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13. Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	22,600.000	-	3,000.000	-	27,300.000	-	52,900.000
	Jumlah Pengeluaran (4)	-	8,894,380.000	-	8,447,225.000	-	7,895,285.000	-	12,582,893.000	-	15,280,227.000	-	11,615,240.000	-	118,383,129.000
5	Pers.Akhir Ops. Di gudang (3-4)	-	18,588,999.000	-	15,006,524.000	-	17,498,422.000	-	8,779,446.000	-	8,840,839.000	-	17,084,849.000	-	17,084,849.000
6	Dimn Perjalanan antar Sub Divre	-	440,975.000	-	802,700.000	-	1,221,602.000	-	95,400.000	-	0	-	-	-	-
7	Sandar Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Stock akhir operasional (5+6+7)	-	17,929,974.000	-	15,809,224.000	-	18,720,024.000	-	8,874,846.000	-	8,840,839.000	-	17,084,849.000	-	17,084,849.000

Lampiran 12. Perbedaan Pemingkatan Mitra Kerja Perum Bulog

Sarana dan Prasarana	Gold	Silver	Bronze
Pengeringan:			
1. Ayakan (paddy cleaner)	Ada, kapasitas >20 ton/jam	Ada, kapasitas <20 ton/jam	Tidak ada.
2. Lantai jemur (lamporan)	Ada, kapasitas >10 ton	Ada, kapasitas antara 5-10 ton	Ada, kapasitas < 5 ton.
3. Mesin pengering (dryer)	Ada, kapasitas >20 ton/hari	Ada, kapasitas <20 ton/hari	Tidak ada
Penggilingan:			
1. Mesin pembersih awal (pre cleaner)	Ada, kapasitas >3ton/jam	Ada, kapasitas 1-3 ton/jam.	Ada, kapasitas <1 ton/jam.
2. Mesin pemecah kulit (paddy husker)	Ada, kapasitas >3ton/jam	Ada, kapasitas 1-3 ton/jam.	Ada, kapasitas <1 ton/jam.
3. Mesin pembersih sekam (husk blower)	Ada, kapasitas >3ton/jam	Ada, kapasitas 1-3 ton/jam.	Ada, kapasitas <1 ton/jam.
4. Mesin pemisah gabah dan beras (separator)	Ada, kapasitas >3ton/jam	Ada, kapasitas 1-3 ton/jam.	Ada, kapasitas <1 ton/jam.
5. Mesin pemisah batu (destoner)	Ada, kapasitas >3ton/jam	Ada, kapasitas 1-3 ton/jam.	Tidak ada
6. Mesin penyosoh (polisher)	Ada, kapasitas >3ton/jam	Ada, kapasitas 1-3 ton/jam.	Ada, kapasitas <1 ton/jam.
7. Mesin pengkabut (shinning machine)	Ada, kapasitas >3ton/jam	Ada, kapasitas 1-3 ton/jam.	Tidak ada
8. Mesin pemisah menir (rice sifter)	Ada, kapasitas >3ton/jam	Ada, kapasitas 1-3 ton/jam.	Ada, kapasitas <1 ton/jam.
9. Mesin pemisah katul (bran shifter)	Ada, kapasitas >3ton/jam	Ada, kapasitas 1-3 ton/jam.	Ada, kapasitas <1 ton/jam.
10. Mesin pemisah beras berdasarkan ukuran (length grader)	Ada, kapasitas >3ton/jam	Ada, kapasitas 1-3 ton/jam.	Tidak ada
11. Mesin pemisah beras berdasarkan warna (grain color shorter)	Ada, kapasitas >3ton/jam	Ada, kapasitas 1-3 ton/jam.	Tidak ada
12. Tempat penyimpanan (product tank)	Ada, kapasitas >10 ton/unit	Ada, kapasitas <10 ton/unit	Tidak ada
13. Mesin pengemasan (packer scale)	Ada, otomatisasi penuh	Ada, otomatisasi sebagian	Tidak ada
14. Mesin jahit otomatis (automatic sewing machine)	Ada, otomatisasi penuh	Ada, otomatisasi sebagian	Tidak ada
Sarana Penyimpanan:			
1. Gudang konvensional	Ada, kapasitas >3.000 ton	Ada, kapasitas <2.000 ton	Tidak ada
2. Tempat penyimpanan gabah (silos/hopper)	Ada, kapasitas >2.000 ton	Ada, kapasitas <1.500 ton	Tidak ada
Sarana Angkutan			
1. Truk	Ada, >5 unit	Ada, <5 unit	Tidak ada
Kelengkapan Pemeriksaan:			
1. Lab kecil (mini lab)	Ada	Tidak ada	Tidak ada
2. Alat ukur kadar air (moisture tester)	Ada, lengkap dan berfungsi	Ada, tetapi tidak lengkap namun berfungsi	Tidak ada
3. Alat pembanding derajat sosoh	Ada, sesuai standar Bulog	Ada, tidak sesuai standar Bulog	Tidak ada
Organisasi			
1. Bagian Quality Control	Ada, dan tidak merangkap jabatan lain	Ada, tetapi merangkap jabatan	Tidak ada

Sumber: Perum Bulog, 2010

Lampiran 13. Lokasi dan Kapasitas Tampung Gudang Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat

No.	Wilayah Kerja	Lokasi	Kapasitas (ton)
1.	Wilayah Padang	Mata Air	10.500
2.		Ampalu	7.000
3.		Pesisir	2.000
4.	Subdivre Bukittinggi	Baso	1.000
5.		Kamang	2.000
6.		Tanjung Pati	1.000
7.		Lb. Sikaping	1.000
8.		Manggopoh	1.000
9.	Subdivre Solok	Koto Baru	1.000
10.		Batusangkar	1.000
11.		Sijunjung	1.000

Sumber: Perum Bulog, 2010

Lampiran 14. Perhitungan Biaya Pengadaan *Move In* dari Divre Jatim tahun 2009

Bulan	Total Pengiriman (ton)	Biaya Transportasi Laut (Kapal)		Biaya Transportasi Darat (Truk)		Biaya Bongkar Muat (Buruh)	
		Total Biaya (Rp/ton)	Biaya (Rp/kg)	Total Biaya (Rp/ton)	Biaya (Rp/kg)	Total Biaya (Rp/ton)	Biaya (Rp/kg)
Januari	12655.37	4,970,143,460.10	392.73	7,854,600.00	20.00	200,000.00	10.00
Maret	5352.77	2,102,139,834.40	392.72	7,854,400.00	20.00	200,000.00	10.00
April	447.23	175,645,110.20	392.74	7,854,800.00	20.00	200,000.00	10.00
Mei	18392.75	7,223,384,707.50	392.73	7,854,600.00	20.00	200,000.00	10.00
Juni	8116.93	3,187,843,088.20	392.74	7,854,800.00	20.00	200,000.00	10.00
Juli	414.09	162,621,424.80	392.72	7,854,400.00	20.00	200,000.00	10.00
Agustus	4000.00	1,570,960,000.00	392.74	7,854,800.00	20.00	200,000.00	10.00
September	7300.00	2,866,929,000.00	392.73	7,854,600.00	20.00	200,000.00	10.00
November	11487.86	4,511,512,379.20	392.72	7,854,400.00	20.00	200,000.00	10.00
Desember	13329.60	5,234,667,216.00	392.71	7,854,200.00	20.00	200,000.00	10.00
Total	81496.6	32,005,846,220.40	3,927.28	785,456,000.00	200.00	20,000,000.00	100.00
Rata-rata pertahun (Rp/kg)			392.73		20.00		10.00

Sumber: Perum Bulog Divre Sumbar, 2009 (Data Diolah)

Lampiran 15. Perhitungan Biaya Pengadaan *Move In* dari Divre Jatim tahun 2010

Bulan	Total Pengiriman (ton)	Biaya Transportasi Laut (Kapal)		Biaya Transportasi Darat (Truk)		Biaya Bongkar Muat (Buruh)	
		Total Biaya (Rp/ton)	Biaya (Rp/kg)	Total Biaya (Rp/ton)	Biaya (Rp/kg)	Total Biaya (Rp/ton)	Biaya (Rp/kg)
Januari	7500.00	3,122,025,000.00	416.27	9,157,940.00	22.00	220,000.00	10.00
Maret	5500.00	2,289,430,000.00	416.26	9,157,720.00	22.00	220,000.00	10.00
Mei	3466.44	1,442,940,314.40	416.26	9,157,720.00	22.00	220,000.00	10.00
Juni	1947.99	810,831,357.60	416.24	9,157,280.00	22.00	220,000.00	10.00
Agustus	5000.00	2,081,250,000.00	416.25	9,157,500.00	22.00	220,000.00	10.00
September	5000.00	2,081,300,000.00	416.26	9,157,720.00	22.00	220,000.00	10.00
Oktober	6358.52	2,646,670,364.80	416.24	9,157,280.00	22.00	220,000.00	10.00
Desember	3160.51	1,315,562,287.50	416.25	9,157,500.00	22.00	220,000.00	10.00
Total	37933.46	15,790,009,324.30	3,330.03	73,260,660.00	176.00	1,760,000.00	80.00
Rata-rata pertahun (Rp/kg)			416.25		22.00		10.00

Sumber: Perum Bulog Divre Sumbar, 2010 (Data Diolah)